

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki penganut muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduknya yang banyak dan wilayahnya yang luas, Indonesia juga bisa menjadi negara pemilik mesjid dan pendidikan Islam terbesar di dunia, mulai dari pendidikan anak usia dini, pesantren, hingga ke perguruan tinggi. Setiap tahun Indonesia adalah penyumbang jama'ah haji dan umrah terbanyak di negeri kelahiran Rasulullah Saw. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya dengan potensi alamnya. Sumber daya alam yang begitu besar tersebut menjadikan posisi Indonesia menjadi sangat penting di mata dunia terlebih-lebih di mata Eropa. Pada saat yang sama karena potensinya yang sangat besar, umat Islam Indonesia juga menjadi ancaman tidak hanya terhadap negara-negara lain dalam arus hubungan internasional, melainkan juga ancaman bagi sesama warga negara Indonesia, terutama bagi pihak-pihak yang berbeda ideologinya.¹

Beranjak dari berbagai potensi yang begitu besar, maka sejak ratusan tahun yang lalu Indonesia telah menjadi pusat perhatian negara-negara Eropa yang ingin mengambil keuntungan dari Nusantara ini. Mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris.² Kedatangan mereka ini yang pada awalnya hanya bermotif perdagangan semata, tapi akhirnya beralih menjadi motif penjajahan. Sebagai bangsa yang bermartabat, kolonisme yang dijalankan oleh pihak Barat mendapat perlawanan yang sengit dari segenap lapisan masyarakat Nusantara. Bukti keperkasaan mereka dalam menentang kolonisme ini masih dapat dilihat dalam berbagai literatur sejarah, baik atas nama kerajaan-kerajaan maupun atas nama masyarakat luas yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama atau masyarakat.

Di dalam bukunya Harun Nasution yang berjudul *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan satu negeri yang kelompok umat Islamnya terbesar yang ada di dunia

¹Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 50.

²*Ibid.*, h. 51.

saat ini, dengan penduduk yang lebih dari 90% dari Bangsa Indonesia ini beragama dengan agama Islam. Seorang orientalis Barat atau sarjana Kristen Belanda yang bernama Snouck Hurgronje pernah mengemukakan bahwa: *Niet de al-Qur'an en de derde eeuw ontstaan, doen ons dien Islam kennen*” yang secara bebas diartikan bahwa: *Bukannya al-Qur'an³ dan Hadis⁴ yang memberikan pemahaman tentang Islam kepada kita, akan tetapi kitab-kitab hukum atau kitab-kitab fiqh dan teologi⁵ yang telah ada sejak abad III H.⁶*

Sejarah telah mencatat bahwa semua agama yang ada di dunia baik itu agama samawi maupun agama ardhhi itu disiarkan dan dikembangkan oleh para pembawanya yang disebut dengan utusan dari Tuhan dan oleh para pengikutnya. Mereka yakin yang bahwa kebenaran yang datang dari Allah Swt itu harus disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman hidup mereka. sebagaimana firman Allah Q.S. Asy-Syura/42: 51,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ.

Artinya: “Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dibelakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan sezi-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana” (Q.S.42:51).⁷

³Al-Qur'an adalah *kalam* Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw secara berangsur-angsur yang susunannya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas dan membacanya dinilai ibadah. Lihat Hasan Mansur Nasution, *Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. viii.

⁴Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, yaitu berupa perkataan, perbuatan, sifat tubuh ataupun akhlakunya. Lihat Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 2.

⁵Teologi berasal dari kata *theos* berarti Tuhan dan *logos* berarti ilmu. Ilmu tentang ketuhanan yaitu: ilmu yang membicarakan tentang Zat Tuhan dari segala seginya dan hubungan dengan alam. Secara umum adalah ilmu yang membicarakan kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala agama dan memberikan hubungan antara Tuhan dengan manusia, baik dengan jalan penyelidikan maupun pemikiran murni atau dengan jalan wahyu. Lihat di Ahmad Hanafi, *Teologi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 5-6.

⁶Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. vii.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), h. 488.

Para penyebar agama banyak yang menempuh perjalanan jarak jauh dari tempat kelahirannya sendiri demi untuk menyampaikan ajarannya. Misalnya Nabi Ibrahim as yang berhijrah dari daerah Babylonia menuju Palestina, Mesir dan Makkah. Nabi Musa as pulang pergi dari Mesir ke Palestina. Nabi Isa as yang hijrah dari Bait Lahm menuju ke Yerusalem dan Nabi Muhammad Saw yang juga hijrah dari Makkah ke Madinah. Para pemeluk agama menyebarkannya lagi ke tempat-tempat yang lebih jauh secara langsung atau secara berantai (*estafet*), sehingga agama-agama sekarang telah tersebar keseluruh pelosok dunia.⁸

Sepanjang sejarah Indonesia, umat Islam mengalami pasang surut dalam perjuangan politiknya. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara misalnya politik Islam cenderung menyatu dengan agama. Dalam hal ini, para ulama memainkan peranan penting di dalam kerajaan dan cenderung menjadi alat justifikasi kekuatan sultan pada masa itu. Lalu, ketika Belanda datang untuk menjajah rakyat Nusantara, Islam juga sangat lihay dalam memainkan peranan pentingnya dalam aksi perlawanan melawan bala tentara Belanda.⁹

Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui yang bahwa Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama dengan agama Islam juga mengalami persoalan yang serius seperti halnya negara muslim lainnya mengenai hubungan antara Islam dan negara, permasalahan ini tampak ketika rakyat Indonesia sudah mulai memasuki gerbang kemerdekaan yaitu pada tahun 1945. Adapun yang menjadi permasalahan tersebut adalah atas dasar apa negara yang baru lahir ini didirikan? Atau dengan kata lain negara yang baru lahir ini berdasarkan atas apa?¹⁰ Pada saat itu para wakil rakyat Indonesia terbagi kedalam dua kubu, kubu yang pertama, mereka mengajukan agar negara Indonesia yang baru lahir ini didirikan berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi keagamaan, kubu ini dinamakan dengan kelompok nasionalis sekuler atau kebangsaan. Kubu kedua, mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar dari negara Indonesia yang

⁸Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 127.

⁹Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 255.

¹⁰Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 3-5.

baru lahir ini, kubu ini dinamakan dengan kelompok nasionalis Islam.¹¹ Kedua aliran tersebut masing-masing diwakili oleh Soekarno dari kubu kebangsaan dan Mohammad Natsir dari kubu nasionalis Islam. Adapun mengenai peran Soekarno dan Mohammad Natsir akan penulis paparkan di bab III.

Perlu diketahui juga, bahwa didalam al-Qur'an tidak ada secara tegas menyebutkan bagaimana bentuk negara yang harus dianut oleh umat Islam; republik atau kerajaan, sistem persidensial atau parlementer, juga tidak ada penjelasan tentang bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala negara, serta bagaimana kekuasaan itu harus dijalankan; apa dengan pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan atau penyatuan kekuasaan. Tapi walaupun demikian didalam al-Qur'an Allah menegaskan seseorang yang diberi amanah untuk memerintah haruslah orang adil yang benar-benar berada di atas semua golongan, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Maidah/5: 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
 اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S.5:8).¹²

Lebih lanjut lagi dalam berbagai kesempatan para pemuka agama Islam dan akademisi sering mempertanyakan persoalan historis, yaitu kegagalan golongan Islam dalam memperjuangkan dasar negara Islam. Demikian pula penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, sedangkan perkataan Ketuhanan ditambah dengan “Yang Maha Esa”.

¹¹Ibid.

¹²Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h, 108,

Pernah suatu ketika Ki Bagus Hadikusumo ditanya oleh Prawoto Mangkusasmito mengenai arti dari Yang Maha Esa, maka dengan spontan Ki Bagus menjawabnya bahwa itu ada tauhid. Perkataan tauhid adalah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti percaya kepada keesaan Tuhan. Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Ikhlâs/112: 1,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

Artinya: *Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa".* (Q.S.112:1).¹³

Golongan Islam yang sudah mengikuti rapat "membuat kesepakatan dengan bersusah payah" merasa sangat kecewa. Tapi semua itu sudah menjadi sejarah yang tidak mungkin untuk diulang kembali, tetapi semangatnya hidup dan bersemayam dihati sanubari rakyatnya. Bagaimana perasaan orang jika sesuatu sudah menjadi sejarah. Kita setuju atau tidak. Tidak pada tempatnya kita menyayangkan sesuatu yang sudah menjadi masa lalu, laksana menyayangkan susu yang sudah tertumpah. Piagam Jakarta merupakan hasil karya panitia sembilan.¹⁴ Tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang yang membahas masalah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya *Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia* menetapkan bahwa tujuh kata yang penting untuk golongan Islam itu dicoret.¹⁵

Pada sore harinya saya menerima telepon dari tuan Nisyijima, pembantu Admiral Mayeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang obsi Kaigun (angkatan laut), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisyijima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir ini yang saya lupa namanya datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*" Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan *diskriminasi* terhadap mereka golongan minoritas. Jika

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, h. 604.

¹⁴Dikatakan panitia sembilan karena panitia ini terdiri dari Sembilan orang yang menandatangani pada tanggal 22 Juni 1945.

¹⁵Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. xiii-xiv.

“*diskriminasi*” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Islam.¹⁶

Inilah sebab-musabab atau asal mula dicoretnya tujuh perkataan “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*” Kemudian tujuh perkataan tersebut dikenal sebagai “*tujuh perkataan Piagam Jakarta*”.

Karena permasalahan sejarah inilah yang membuat penulis ingin sekali mengangkat sebuah judul yang berkenaan dengan permasalahan Peletakan Dasar Negara oleh Tokoh-tokoh Indonesia pada masa silam. Akhirnya **Dinamika Politik Islam Di Indonesia Pra Kemerdekaan Sampai Indonesia Merdeka** menjadi judul tesis yang penulis usulkan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2015.

Penulis menganggap bahwa topik ini masih sangat relevan dan sudah semestinya mendapat pembahasan yang konprehensif. Dengan demikian penulisan ini mempunyai bingkai dan kerangka tersendiri yang berbeda dengan hasil kajian sebelumnya. Studi kepustakaan atau disebut juga dengan survey literatur yang penulis pilih ini tidak lain tidak bukan agar lebih termotivasi penulis dalam membaca karena Firman Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad pun berupa anjuran untuk membaca, maka karena itulah penulis menyusun karya ilmiah ini lebih ke studi pustaka, semoga saja kedepan penulis lebih sering dalam membaca dan menulis.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menempati posisi penting dalam suatu penelitian. Demikian pula dalam penelitian tesis ini. Oleh sebab itu, berangkat dari latar belakang di atas, pembahasan dalam penelitian ini akan di batasi dan difokuskan pada dinamika perpolitikan Islam di Indonesia. Berkaitan dengan kelanjutan pembahasan, maka rumusan masalah yang selanjutnya dijadikan dasar acuan dalam penyusunan tesis ini adalah:

¹⁶ *Ibid.*, h. xv. Lihat juga di Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tintamas, 1969), h. 66-67.

1. Bagaimana perjuangan organisasi Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi bangsa?
2. Mengapa ideologi Islam yang diperjuangkan oleh organisasi Islam dapat dikalahkan?
3. Apa saja yang menjadi penyebab dari kekalahan organisasi Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas dapat ditegaskan bahwa tujuan utama dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dinamika perpolitikan Islam di Indonesia. Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjuangan organisasi Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi bangsa.
2. Untuk mengetahui mengapa ideologi Islam yang diperjuangkan oleh organisasi Islam dapat dikalahkan.
3. Untuk mengetahui penyebab dari kekalahan organisasi Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna dan dapat menjadi sumbangan bagi mahasiswa pemikiran politik Islam dan bagi masyarakat yang tertarik dengan sejarah perpolitikan Islam di Indonesia. Akhirnya juga sangat penulis harapkan semoga penulisan ini bisa menjadi tambahan kajian perpustakaan di kampus-kampus dan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang ilmu politik.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan studi politik Islam di Indonesia dengan cara merangsang penelitian tentang Dinamika Politik Islam Indonesia yang lebih mendalam. *Kedua*, untuk memberi masukan kepada para mahasiswa pemikiran politik Islam serta untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. *Ketiga*, untuk

dapat meraih gelar Magister di Program Pascasarjana UIN Sumatra Utara dalam bidang Ilmu Sosial Politik Islam. Dengan demikian dapat menyumbangkan pemikiran kami dalam kemajuan perpolitikan Islam di Indonesia pada khususnya dan kemajuan Islam pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini, terlebih dahulu penulis akan membahas sekilas mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Banyak para pakar-pakar sejarah yang berbeda pendapat akan dimana tempat pertama sekali, bagaimana cara masuknya, siapa yang membawanya dan kapan pastinya Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan informasi-informasi dan metode yang mereka peroleh itu semuanya memiliki alasan yang kuat dalam mempertahankan keabsahan pendapat mereka masing-masing.

Azyumardi Azra menyatakan bahwa Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha untuk menjawab permasalahan pokok diatas belum ada yang mampu menjawab secara tuntas. Hal tersebut menurutnya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, melainkan juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada artinya terdapat kecendrungan kuat akan suatu teori tertentu yang menekankan hanya aspek-aspek khusus dari beberapa aspek permasalahan pokok di atas dan mengabaikan aspek-aspek lainnya.¹⁷

Ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini. diantaranya:

Teori Gujarat dan Malabar, disebut teori Gujarat dan Malabar karena teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk pertama sekali ke Nusantara¹⁸ (Indonesia¹⁹)

¹⁷Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 52.

¹⁸Nusantara merupakan nama lama bagi kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai ke Marauke.

¹⁹Penyebutan kata Indonesia dalam beberapa konteks mengenai Islamisasi ini sebenarnya kurang tepat, karena istilah "Indonesia" baru muncul pertama sekali pada tahun 1850 dan berdiri sebagai negara kebangsaan secara territorial geografis sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apalagi sebelum tahun 1850 di wilayah yang disebut Indonesia ini masih banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Istilah yang barangkali lebih tepat adalah Kepulauan Melayu atau Nusantara (yang dalam berbagai kajian sarjana Barat disebut *Archipelago*). Dalam beberapa hal,

pada abad ke-12 dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Teori ini dikembangkan oleh Pijnappel pada tahun 1872 dan banyak dukungan dari sarjana-sarjana Barat, seperti Snouck Hurgronje, Moquitte dan Morisson.²⁰

Menurut Pijnappel, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam masuk ke Nusantara.²¹ Menurut Snouck Hurgronje, abad ke-12 sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam ke Nusantara.²²

Teori Bengal, disebut teori Bengal karena dari sinilah awal mula Islam masuk pada abad ke-11. Teori ini dikembangkan oleh S.Q. Fathimi, ia juga berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali. Bengal ini di Semenanjung Malaya pantai timur, bukan dari barat (Malaya).²³

Teori Arab, teori ini menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab tepatnya dari Hadhramaut. Teori ini dikembangkan oleh Thomas W. Arnold, menurutnya pedagang-pedagang dari Arab sendiri yang memegang peranan dominan dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Ini terjadi pada abad ke-7 dan ke-8 atau awal-awal abad pertama Hijriah dan pada tahun 674 M di pantai barat Sumatera telah ada satu perkampungan orang-orang Arab.²⁴

Sekalipun demikian perbedaan pendapat mengenai permasalahan kapan, mengapa dan bagaimana Islam masuk ke Nusantara, penulis lebih cenderung kepada pendapat ke tiga yaitu teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7 M atau abad 1 Hijriah. Hal ini sangat sesuai dengan hasil seminar yang diadakan di Medan tanggal 17-20 Maret 1963 terdapat kesepakatan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, bukan dari Bengal ataupun

pengertian ini juga meliputi beberapa wilayah lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Filipina Selatan serta Thailand Selatan. Lihat Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 256.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, h. 257.

²⁴*Ibid.*

Gujarat (India). Tidak pula pada abad ke-11 atau ke-12 M, tetapi abad ke-7 M atau 1 Hijriah.

Dari berbagai macam teori yang telah penulis sebutkan diatas dapat kita ambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, mungkin saja benar bahwa Islam sudah diperkenalkan dan masuk ke Indonesia pada abad 1 H, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arnold dan di dukung oleh sebagian besar sarjana Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi proses islamisasi baru mengalami kemajuan pada abad ke-11 dan ke-12 M. *Kedua*, mungkin benar bahwa Islam dibawa langsung dari Arab melalui pedagang Arab, tapi peran pedagang muslim India tidak dapat dinafikan. *Ketiga*, islamisasi dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi mengalami kemajuan dan pengaruh yang luar biasa setelah melalui kalangan elit politik.

F. Kajian Terdahulu

Topik yang penulis angkat ini meliputi lebih daripada studi tentang seorang pemimpin muslim atau satu organisasi atau himpunan tertentu. Pembahasan tentang dasar dan struktur negara ini praktis menyangkut dan melibatkan semua pemimpin agama dan politik Indonesia pada masa sekitar 1945 dan lagi-lagi pada tahun 1950-1960. Bahkan sampai dengan saat ini pun masalah tersebut tampaknya tetap menjadi isu yang hidup dan amat kontroversial secara politik ideologi dan kemungkinan akan tetap hangat di tahun-tahun yang akan datang.

Topik atau pembahasan masalah dasar negara ini sungguh sangat melegendaris, sehingga amat sangat wajar dan cukup beralasan jika banyak orang mulai dari masyarakat, akademisi, hingga politisi yang penasaran dan ingin mengkaji lebih jauh mengenai sejarah permasalahan penerapan dasar negara Indonesia. Ini membuktikan yang bahwa permasalahan atau sejarah pada masa awal kemerdekaan sangat menarik untuk di angkat.

Sejauh penelusuran data yang penulis lakukan sudah ada sejumlah karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Di antara lain dibawah ini penulis mengemukakan karya yang relevan dengan topik penulis;

Yang pertama ada H. Endang Saifuddin Anshari, M.A dengan judul bukunya *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Buku setebal 270 halaman ini merupakan tesis beliau dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Master of Arts di Institut of Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada pada tahun 1976. Yang judul aslinya *The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman's Agreement between the Islamic and the Secular Nationalist in Modern Indonesia*.²⁵ Membahas mulai dari sejarah Indonesia mulai tahun 1905 sampai dengan tahun 1945 hingga terbentuknya Pancasila yang sebagian orang berpendapat sosok Soekarnolah sebagai pencetus awal dari Pancasila tersebut, seperti Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang pada tahun 1947 ketika diterbitkan buku kecil yang berisi pidato Soekarno, dan dia juga yang memberinya kata pengantar dan menamainya *Lahirnya Pancasila*. Pandangan yang sama dikemukakan juga dalam dokumen resmi *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, yang memandang bahwa pidato Soekarno tersebut merupakan pembahasan pertama tentang *Pancasila* dan dengan demikian tanggal 11 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai lahirnya Piagam Jakarta hingga penghapusan tujuh kata yang ada di Piagam Jakarta tersebut yang sangat dibanggakan oleh kelompok Islam pada masa itu. Hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959²⁶ oleh Soekarno yang diumumkan secara resmi di depan gedung Istana Merdeka Jakarta jam 5 sore.²⁷

Kemudian ada Dr. Katimin, M.A, *Politik Islam Indonesia Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*. di buku yang terdiri dari 6 bab dan yang di terbitkan tahun 2007 oleh Citapustaka Media dan yang tebal bukunya mencapai 205 halaman ini yang juga berasal dari disertasi beliau. Beliau ingin mengkaji tentang penyebab kekalahan umat Islam dalam mengusung dasar negara Islam di sidang Konstituante pada tahun 1956-1959, dan ada beberapa pertanyaan lagi yang membuat beliau selalu dihantui semenjak beliau mengikuti pendidikan S1 sampai memasuki pendidikan S3 di Universitas Islam

²⁵Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. xxv-xxvi.

²⁶Untuk lebih jelas tentang bunyi dari dekrit Presiden lihat lampiran III dari tesis ini.

²⁷Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 16-17.

Negeri (UIN) Jakarta.²⁸ Di buku ini beliau memulainya dari hubungan antara Islam dan negara pada masa pra-Modern sampai hubungannya pada masa Modern, di sini juga beliau menggali sejarah Islam, yang dimulai dari Islamisasi kerajaan-kerajaan sampai mengantar rakyat Indonesia ke depan gedung Kemerdekaan, lebih lanjut lagi dibahas juga masalah pemilihan umum yang pertama pada masa Presiden Soekarno yaitu pada tahun 1955 hingga pembentukan Konsituante, pada awalnya golongan Islam ternyata satu visi dalam hal membicarakan mengenai dasar negara, yang pada awalnya kelompok ini berada dalam satu atap yaitu organisasi Masyumi.²⁹

Selanjutnya ada Dr. Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*. Buku yang setebal 262 halaman ini ditulis pada tahun 2009 dan di terbitkan oleh Gema Insani di Jakarta. Buku ini ditulisnya dikarenakan pada suatu ketika bertepatan pada tanggal 9 Juni 2009 saat beliau berada di Kota Bandung, beliau menemukan sebuah Tabloid Kristen, *Reformata* yang menurut beliau sangat berani mengungkapkan aspirasi kaum Kristen secara lebih terbuka ketimbang media Kristen lainnya. Pada saat beliau membaca edisi 103/2009, beliau sangat terkejut karena di dalamnya mempersoalkan penerapan syariat Islam.³⁰ Para anggota DPR yang sedang mendudukkan RUU Makanan Halal dan RUU Zakat dikatakan akan meruntuhkan Pancasila dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, Tabloid Kristen ini menuduh umat Islam Indonesia sedang berpesta pora melaksanakan syariat Islam di Indonesia saat ini. Yang membuat beliau sangat geram saat menemukan lagi Tabloid *Reformata* Menjelang pilpres 2009 edisi 110/2009.³¹ Beliau mengutip pengantar redaksinya:

“Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau maneuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal

²⁸Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. v-vii.

²⁹*Ibid.*, h. 100-103.

³⁰Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 9-13.

³¹*Ibid.*

memperjuangkan diberlakukannya “Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan itu lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam peraturan perundang-undangan. Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariat, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan lain-lain. Apa pun alasannya, semua ini bertentangan dengan prinsip dasar negeri ini.”³²

Dibuku ini juga menyebutkan bahwa misi kaum Kristen dalam menggertak umat Islam yang berniat menerapkan ajaran Islam di Indonesia dalam menolak Piagam Jakarta, kaum minoritas Kristen seperti yang dilakukan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) biasanya mereka membawa-bawa nama Pancasila dan UUD 1945 ketika hendak menolak aspirasi kaum mayoritas yaitu kaum Islam, mereka dengan bangga menyandarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Tentu semua maklum yang bahwa rumusan Pancasila ini adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan: “*Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.*” Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945, di mana rumusan Pancasila tercantum di dalamnya.³³

Kemudian ada buku yang berjudul *Pancasila Sebagai Dasar Negara* yang diterbitkan atas kerjasama yang baik antara Inti Idayu Press dengan Yayasan Pendidikan Soekarno, buku setebal 165 halaman ini merupakan kumpulan pidato atau kursus tentang Pancasila oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta, tanggal 26 Mei, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juni dan 3 September 1958, serta kuliah-kuliah umum pada Seminar Pancasila di Yogyakarta tanggal 21 Februari 1959 dan terakhir pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945.³⁴

Secara garis besar buku ini mengupas tentang apa itu sebenarnya Pancasila, mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa

³²*Ibid.*, h. 11.

³³*Ibid.*, h. 50-51.

³⁴Soekarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), h. 19.

sampai sila yang akhir yang berbunyi Keadilan Sosial. Sebagaimana telah penulis paparkan tadi yang bahwa buku ini merupakan kumpulan dari pidatonya Presiden pertama kita.

Seperti dalam halaman 107, Presiden Soekarno merasa sangat gembira, belum pernah beliau merasa segembira ini sebelumnya karena setuju seratus persen dengan apa yang dikemukakan oleh seorang mahasiswi yang bernama Lina. Di sini Lina mengemukakan “*Marilah kita mengenang jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita kealam baka*”. Kemudian lanjutnya “*Atas kepemimpinan kita, marilah kita semuanya ingat, yang bahwa kita nanti pasti ditanyak tentang kepemimpinan kita semua, tidak terkecuali, apa engkau berbuat kebajikan untuk masyarakat ataukah engkau berbuat jahat untuk mereka semua*”.³⁵

Ada juga buku yang berjudul *Pancasila Dasar Falsafah Negara* yang dikarang oleh Rozikin Daman. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh RajaGrafindo Persada atas kerjasamanya dengan Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press. Buku yang terdiri dari 9 bab ini mempunyai ketebalan 226 halaman. Seperti bab ke-4 dalam buku ini, disitu Rozikin Daman membahas masalah Sejarah Perumusan Pancasila, yang diawali dengan perlawanan rakyat Nusantara terhadap penjajahan Jepang, pembentukan BPUPKI, lahirnya istilah Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Proklamasi Kemerdekaan pada akhirnya.³⁶

Kemudian ada buku yang dikarang oleh Dr. Yusril Ihza Mahendra, dengan judul bukunya, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*. Buku ini dibagi kedalam tiga bagian, bagian pertama Ihza banyak membahas masalah konstitusi, seperti dalam poin kedua halaman 19 dalam bagian ini menyebutkan semua konstitusi yang pernah dan yang sedang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara 1950 dapat digolongkan kedalam konstitusi sosial. Ketiga konstitusi ini didahulukan oleh sebuah pembukaan, di mana didalam pembukaan itulah dimuat rumusan-rumusan

³⁵*Ibid.*, h. 107.

³⁶Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 41-44.

filosofis tentang maksud, tujuan dan dasar keberadaan negara Republik Indonesia.³⁷

Masih banyak pembahasan dalam buku ini yang penting untuk penulis keluarkan, tapi tidak disini tempatnya, penulis akan mengutip sebagian saja yang sesuai dengan keperluan pembahasan yang sedang penulis garap ini. Buku ini tebalnya 237 halaman, yang diterbitkan oleh Gema Insani Press di Jakarta tahun 1996.

Yang terakhir ada Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag dengan Drs. H. Amin Husein Nasution, M. A. dengan judul bukunya *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Di dalam buku ini yang ketebalan bukunya mencapai 364 halaman lebih banyak membahas masalah tokoh-tokoh pemikir politik Islam yang dari abad naik unta hingga abad naik besi terbang, diantara tokoh-tokoh pemikir yang dibahas antara lain ada Al-Farabi (257-339 H/870-950 M)³⁸, Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M)³⁹, Al-Ghazali (450-501 H/1059-1111 M)⁴⁰, Ibn Taimiyah (1263-1326 M)⁴¹, Ibn Khaldun (723-808 H/1332-1406 M)⁴² Muhammad Abduh (1849-1905 M)⁴³, Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M)⁴⁴, Muhammad Iqbal (1877-1938 M)⁴⁵ di India, Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938 M)⁴⁶ di Turki, Mohammad Natsir di Indonesia, sampai Ayatullah Ruhullah Khomeini yaitu seorang tokoh Syi'ah yang mempunyai peranan penting dan sentral dalam mengaktualisasikan dan merealisasikan konsep Imamah Syi'ah Imamiyah ke dalam realitas politik Islam Syi'ah Modern di Iran melalui gagasan tentang *wilayah al-faqih*.⁴⁷ Di buku ini juga membahas sejarah Indonesia masa silam, mulai dari Kerajaan Nusantara, penjajahan, demokrasi hingga era reformasi.

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 19

³⁸ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 5.

³⁹ *Ibid.*, h. 16.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 25.

⁴¹ *Ibid.*, h. 31-32.

⁴² *Ibid.*, h. 41-46.

⁴³ *Ibid.*, h. 66-70.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 76-78.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 87-90.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 105-107.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 230-235.

Setelah penulis membaca beberapa buku yang berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia, penulis sangat tertarik dengan beberapa permasalahan, terutama masalah kegagalan wakil-wakil Islam dalam menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia yang baru lahir ini, karena kita juga tahu bahwa hampir seluruh penduduk Nusantara ini beragama dengan agama Islam, tetapi kenapa kegagalan wakil-wakil Islam ini bisa terjadi.

Perlu untuk diingat juga yang bahwa, pemikiran politik pada saat itu terfokus kepada dua aliran; *pertama* dasar negara yang berakar pada agama, dan *kedua* dasar negara yang sama sekali terlepas dari agama (sekuler). Dari setiap kelompok ini memiliki kesepakatan yang sama dalam mengemukakan aspirasinya. Perbedaan pendapat ini sangat dihargai pada masa itu.

Dalam kajian ini menjadi sangat menarik, penting dan relevan, apalagi sedikit dikaitkan dengan pancasila yang akhirnya menjadi sebagai ideologi bangsa ini. Untuk melihat peristiwa itu kembali bagaimana perjuangan para wakil-wakil Islam menghadapi kelompok sekuler dalam usahanya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Wakil-wakil Islam berjuang dengan cara-cara yang demokratis, bukan anarkhis.

Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh wakil-wakil Islam di dalam sidang Konstituante menghadapi kelompok sekuler terhadap persoalan dasar negara. Ini merupakan persoalan yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, mengingat permasalahan ini masih sedikit mendapat perhatian dari para akademisi. Permasalahan inilah yang menjadi arah dalam penulisan tesis ini.

G. Batasan Istilah

Dinamika disini lebih kurang artinya pergerakan politik Islam yang terjadi pada masa pra kemerdekaan sampai Indonesia merebut Kemerdekaan dari pihak Jepang.

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani atau bahasa Latin yaitu *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Diartikan juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan otoritas atau kekuasaan dan mengacu pada peraturan urusan

publik dalam suatu unit politik dengan metode dan taktik yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan, kekuasaan dan pemerintahan.⁴⁸ Kalau menurut penulis sendiri Politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintah.

Islam merupakan agama mayoritas penduduk Nusantara dulu dan sekarang yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan rasul terakhir-Nya dan mengembalikan segala sesuatu hal kepada Al-Quran dan Hadis.

Pra kemerdekaan disini adalah rakyat Indonesia sebelum merdeka, yaitu masa-masa Islamisasi Nusantara⁴⁹, kerajaan Nusantara, dimana dimasa itu juga sebagian besar dari Indonesia masih di jajah oleh Bangsa Belanda.

Indonesia Merdeka dimana saat itu Indonesia sebagai negara yang baru berdiri dihadapi dengan masalah ideologi yang sangat mendasar yaitu atas dasar apa Negara ini dibentuk, multi tafsir terhadap pancasila, pembubaran konstituante hingga kembali lagi ke UUD 1945 yaitu bertepatan dengan di keluarkan dekrit oleh presiden pertama kita yaitu Bapak Ir Soekarno bertepatan dengan tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada hari Minggu 5 Juni 1959 di depan Istana Merdeka di Jakarta.

H. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research). Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya yang mengutamakan proses dan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Seperti penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal-balik.⁵⁰

⁴⁸Inu Kencana Syafi'ie, *Sistem Politik di Indonesia* (Bandung: Insani Press, 2010), h. 6-7.

⁴⁹Nusantara merupakan sebuah nama bagi kepulauan yang tersebar dari ujung barat "Sabang" sampai ujung timur "Merauke". Nama Indonesia sendiri sebagai nama politik mulai digunakan sejak awal abad XX. Lihat Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 18. Muhammad Yusof Hashim, *Persejarah Melayu Nusantara*, (Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1988), h. xi.

⁵⁰Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 21.

Lebih lanjut lagi Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹

Metode penelitian sejarah sering juga disebut metode sejarah. Metode itu berarti cara, jalan atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sedangkan metodologi adalah ilmu yang membicarakan jalan. Adapun metode dalam penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang maksimal dan objektif. Metode penelitian disini adalah suatu perangkat, cara atau langkah yang penulis tempuh untuk menyelesaikan permasalahan.⁵² Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode *historis* atau sejarah, yaitu suatu langkah atau cara merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik, menafsirkan dan mensintesis data dalam rangka menegakkan fakta serta kesimpulan yang kuat.⁵³ Dalam penelitian sejarah ini prosedur yang harus dilakukan meliputi empat tahap:

1. Heuristis

Heuristis adalah satu tahapan dalam pengumpulan data sejarah, baik yang tertulis maupun yang lisan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.⁵⁴ untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, khususnya dalam kajian ini adalah mengenai segala kejadian yang terjadi di awal-awal kemerdekaan bangsa ini.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam kajian ini adalah buku Dr. Katimin, MA, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, Bandung: Citapustaka Media, 2007. Kemudian bukunya H. Endang Saifuddin Anshari, MA, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah*

⁵¹*Ibid.*

⁵²Kontowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995), h. 91-92.

⁵³Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), h. 55.

⁵⁴Kontowijoyo, *Metode Sejarah* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 23. Lihat juga Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 93-94.

Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949). Dalam mencari berbagai sumber tersebut penulis menelusuri berbagai perpustakaan di antaranya ada perpustakaan UIN SU pascasarjana yaitu kampus penulis, perpustakaan UIN SU yang ada di jalan Pancing, perpustakaan Perda Medan di depan Istana Maimun, Perpustakaan MUI di jalan Sutomo Ujung, dan perpustakaan Unimed.

2. Verifikasi

Verifikasi yaitu suatu tahapan untuk mendapatkan keabsahan sumber data yang valid melalui kritik *intern* dan kritik *ekstern*. Kritik *intern* untuk mengetahui kredibilitas sumber, sedangkan kritik *ekstern* adalah untuk menguji dan meneliti keotentikan sumber yang telah penulis peroleh, sehingga kevaliditas sumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian yang penulis lakukan sekarang ini salah satu teknik dalam mengumpulkan data tentang hal-hal yang terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia adalah dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen yang penulis gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia.

Perlu untuk diketahui juga yang bahwa setelah data ini penulis peroleh dan menjadi sumber dari penelitian yang sedang penulis lakukan ini. data ini tidak serta merta penulis terima begitu saja. Akan tetapi penulis akan mengkritik data tersebut agar memperoleh keabsahan data. Adapun cara mengkritiknya sudah penulis paparkan sedikit diatas, yaitu melalui kritik *ekstern* dan *intern*. Kritik *ekstern* sebuah dokumen tertulis, maka untuk membuktikan keaslian dari dokumen tersebut dikritik dari bagaimana kertasnya, tintanya, gaya bahasanya, kalimatnya, unkapannya dan sebagainya yang bersifat *ekstern*. Tapi dalam penelitian ini penulis lebih menggunakan kritikan *intern* yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan

menelaah secara mendalam dari berbagai literature yang sudah diperoleh, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁵⁵

3. Interpretasi

Interpretasi sejarah seringkali disebut pula dengan analisis sejarah, ini semua bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang penulis peroleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori, sehingga disusunlah fakta kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh.⁵⁶ Lebih lanjut lagi, kemampuan interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Tidak ada masa lalu dalam konteks sejarah yang actual karena yang ada hanyalah interpretasi historis. Tidak ada interpretasi yang bersifat final, sehingga setiap generasi berhak mengerangkakan interpretasinya sendiri.⁵⁷

Ketika seluruh data yang mengenai permasalahan yang peneliti kaji terkumpul sudah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data ini sangat diperlukan oleh seorang peneliti, karena dengan adanya analisis tersebut, maka akan jelas maksud dari data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti harus serius dalam menanggapi dan memusatkan perhatiannya terhadap data yang sudah terkumpul. Ini semua menentukan hasil dari analisis peneliti.

4. Historiografi

Perkataan sejarah mempunyai dua arti yang dapat membedakan antara sejarah dengan penulisan sejarah. Sejarah adalah kejadian sejarah yang sebenarnya, hanya terjadi sekali dan bersifat unik. Ini dalam arti objektif. Adapun dalam arti subjektif adalah gambaran atau cerita serta tulisan tentang kejadian tersebut. Historiografi adalah suatu

⁵⁵Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 64. Lihat juga Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, h. 101-102.

⁵⁶Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 65.

⁵⁷Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, h. 107.

proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.⁵⁸

Historiografi adalah fase terakhir dalam metode sejarah ini. Fase terakhir ini berupa paparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang telah penulis lakukan. Di fase ini juga penulis berusaha menyajikan sesuai dengan ketentuan penulisan sejarah dan penulisan yang berlaku sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas.⁵⁹

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan Tesis ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Bab demi bab dibagi kedalam beberapa sub bab yang tetap memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah sistematika penulisan Tesis ini secara umum.

1. Bagian awal tesis ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi tesis terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pada bagian ini penulis mencantumkan dasar dan argumentasi serta signifikansi penelitian, masalah dijabarkan dengan jelas disertai dengan keterangan bahwa masalah ini memerlukan penelusuran yang mendalam. Kemudian rumusan masalah, dibagian ini penulis merumuskan dengan tegas dan jelas, sehingga ruang lingkup masalah lebih jelas arahnya, dibagian ini penulis juga membuat dalam bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Selanjutnya tujuan penelitian, ini

⁵⁸*Ibid.*, h. 147.

⁵⁹Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 67-68.

merupakan jawaban yang penulis pertanyakan di rumusan masalah. Manfaat atau kegunaan penelitian disini penulis harapkan secara teoritis menjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan secara praktis untuk kegunaan di tengah masyarakat. Kemudian Kerangka Teoritik yang penulis sediakan untuk menggambarkan isi dari kajian yang penulis sajikan dalam tesis ini, dan kajian terdahulu berisi hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan sekaligus menghindari plagiasi. Batasan istilah memuat penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada judul tesis penulis ini. metode penelitian dan sumber data dan yang terakhir sistematika pembahasan, di bagian ini penulis menggambarkan isi keseluruhan dari penulisan tesis penulis.

BAB II : Di bab kedua ini penulis ingin menceritakan sedikit tentang Islam di Indonesia, dimulai dari Islamisasi di Indonesia, respon dari penduduk pribumi Islam menyebar ke segala penjuru nusantara ini, sehingga lahirlah bermacam organisasi-organisasi Islam yang memperjuangkan dan mendakwahkan Islam sampai-sampai organisasi itu menjadi partai Islam pada akhirnya

BAB III : Bab ketiga dari penulisan tesis ini, penulis ingin mencoba menulis tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Disini penulis memulainya dari bagaimana bisa Pancasila itu lahir, hingga berbagai macam penafsiran terhadap Pancasila, kemudian perdebatan yang memanas yang terjadi di ruang BPUPKI antara dua kelompok besar ideologi dalam mendiskusikan dasar negara yang baru lahir, hingga lahirnya kesepakatan antara dua kelompok besar itu yang disebut dengan *the Jakarta Charter* atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Piagam Jakarta. Di bagian ini penulis juga menulis

tentan dekrit presiden yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 dan penulis tutup bab ini dengan respon atau reaksi golongan Islam saat dekrit itu di publikasi untuk umum oleh presiden Ir. Soekarno.

BAB IV : Penulis memberi judul dengan Islam sebagai dasar negara. Di bab yang ke-empat ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan terdahulu di bab pertama. Adapun sub bab dalam bab ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar dari negara Indonesia ini, kekalahan yang menimpa organisasi Islam dan yang terakhir adalah penyebab dari kekalahan ideologi yang diperjuangkan oleh organisasi Islam.

BAB V : Di bab yang terakhir ini yaitu berupa penutup dari tesis ini. Disini penulis mengesimpulkan dari penulisan tesis penulis, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir tesis : terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup diri penulis.

BAB II ISLAM DI INDONESIA

A. Proses Islamisasi di Indonesia

1. Waktu Masuknya Islam ke Indonesia

Di kalangan para pakar terjadi perbedaan pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia.⁶⁰ Ada yang mengatakan masuknya sekitar abad 12/13 M, ini terutama pendapat para penulis sejarah Barat, terutama Sarjana Belanda yang kemudian di aminkan oleh sebagian besar penulis

⁶⁰ Penyebutan “Indonesia” dalam konteks ini sebenarnya kurang tepat, karena istilah “Indonesia” baru muncul pertama kali pada tahun 1850 dan berdiri sebagai negara kebangsaan secara teritorial geografis sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apalagi sebelum tahun 1850 di wilayah yang disebut Indonesia ini terdapat banyak kerajaan yang berdiri sendiri. Istilah yang berangkali lebih tepat adalah Kepulauan Melayu atau Nusantara yang dalam berbagai kajian sarjana Barat biasa disebut *Archipelago*. Untuk lebih jelas bisa lihat Muhammad Yusoff Hashim, *Persejaraan Melayu Nusantara*, (Kuala Lumpur: Teks Publishing, 1988), h. xi.

Indonesia. Ada juga pendapat yang mengatakan masuknya Islam pada abad 10/11 M dan pendapat yang terakhir menegaskan yang bahwa masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7/8 M. Pendapat terakhir inilah yang berkembang akhir ini berdasarkan penyelidikan-penyelidikan dan seminar-seminar yang dilakukan secara terus-menerus.⁶¹

Dalam penelitian Azyumardi Azra sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dan kawannya H Amin Husein Nasution menyebutkan bahwa setidaknya perbedaan mereka terjadi menyangkut masalah-masalah tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Kemudian beliau melanjutkan, ada beberapa teori yang berkembang dalam masalah-masalah ini. Di antaranya: *pertama*, teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia (Nusantara) pada abad ke-12 M dari Gujarat dan Malabar, bukan dari Persia atau Arabia. Teori ini dikembangkan oleh Pijnappel pada tahun 1872 dan didukung oleh umumnya sarjana-sarjana Belanda, seperti Snouck Hurgronje, Moquitte dan Morisson. Menurut Pijnappel, seperti yang dikutip oleh Azyumardi Azra menyebutkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan kemudian membawa Islam ke Nusantara.⁶² Sementara Snouck Hurgronje yang mendukung teori ini tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah mana di India yang dianggap sebagai asal kedatangan Islam. Ia hanya menyebutkan abad ke-12 M sebagai waktu yang paling memungkinkan penyebaran Islam di Indonesia. Adapun menurut Morisson menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Pantai Coromandel (Pantai Timur India).⁶³

⁶¹A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 348-349.

⁶²Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 25.

⁶³Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2010), h. 256.

Kedua, teori yang dikembangkan oleh S.Q. Fathimi, yang mengemukakan bahwa Islam datang dari Bengal. Ia berargumentasi yang bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali atau orang keturunan mereka. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya melalui Canton, Phanrang (Vietnam), dan Trengganu.⁶⁴

Teori *ketiga* menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab, tepatnya Hadhramaut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawford (1820) dan didukung oleh Salomon Keyzer (1859), Niemann (1861), de Hollander (1861) dan Veth (1878). Crawford menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara langsung berasal dari Arab. Sementara Salomon Keyzer, Niemann dan De Hollander berargumentasi bahwa umat Islam di Nusantara bermazhab dengan mazhab Imam As-Syafi'i sebagaimana halnya mazhab umat Islam di Mesir dan Hadhramaut.⁶⁵

Lebih lanjut lagi Thomas W. Arnold (1913) yang juga menegaskan bahwa selain dari Coromandel, Islam Indonesia juga berasal dari Malabar. Namun lanjutnya, daerah-daerah ini bukanlah satu-satunya tempat asal kedatangan Islam. Ia juga mengajukan pandangan yang bahwa pedagang-pedagang dari Arab sendiri memegang peranan penting dalam menyebarkan Islam ke Nusantara, bahkan sejak abad ke-7 dan ke-8 M atau awal-awal abad pertama Hijriah. Menurutnya, pada tahun 674 M di pantai sebelah barat Sumatera telah didapati satu kelompok perkampungan orang-orang Arab.⁶⁶

Teori Arab ini juga dipegang pula oleh sarjana Melayu Syed Hussein Naquib al-Attas⁶⁷ dan Hamka. Dalam seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tanggal 17-20 Maret 1963, Hamka

⁶⁴*Ibid.*, h. 257. Lihat juga Azra, *Perspektif Islam*, h. xii.

⁶⁵*Ibid.*, h. 257

⁶⁶*Ibid.*, h. xi.

⁶⁷Syed Hussein Naquib al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* (Bandung: Mizan, 1990), h. 53-54.

menyimpulkan hal yang sama. Hamka bahkan mengemukakan teori Snouck Hurgronje dan kawan-kawannya serta menyatakan bahwa teori tersebut adalah salah satu rekayasa ilmiah Belanda dalam rangka melemahkan dan mematahkan perlawanan Islam terhadap para penjajah dari Belanda. Hurgronje sendiri adalah penasihat utama Pemerintahan Hindia Belanda dalam penaklukan Aceh. Inilah salah satu penyebab kerasnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda sehingga sangat sulit untuk menguasai Aceh. Menurut Snouck Hurgronje karena berurat berakarnya pengaruh Arab tersebut. Oleh karena itu, ia ingin sekali melemahkan pengaruh tersebut dari jiwa rakyat Aceh dengan cara mengembangkan teori India.⁶⁸

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pendapat mengenai waktu, asal dan cara masuknya agama Islam ke Indonesia diadakanlah seminar Masuknya Islam Ke Indonesia di Medan pada tanggal 17-20 Maret 1963 menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut sumber-sumber yang terbaru, Islam pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (abad ke-7/8 Masehi), dan langsung dari Arab.
- b. Bahwa daerah yang pertama didatangi oleh Islam adalah pesisir pulau Sumatera yaitu daerah Baroe tempat kelahiran ulama besar yang bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama kali ialah di Pase (Aceh)⁶⁹
- c. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif dalam mengambil bagian yang berperan.

⁶⁸Hamka, *Masuk dan Berkembangnja Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera Utara*, "dalam *Risalah Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia*, (Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, 1963), h. 79-81. Sebagaimana diketahui, Snouck Hurgronje juga mengembangkan teori resepsi untuk melemahkan semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap Pemerintahan Hindia Belanda. Dalam teori ini ia menyatakan bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Dalam masyarakat adat Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang asing (tamu) dan keberlakuannya dapat diakui kalau sudah diresepsikan oleh hukum adat sehingga menjadi bagian dari hukum adat. Lihat juga Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Jilid X*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 146.

⁶⁹Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 134.

- d. Penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan jalan damai.
- e. Mubaligh-mubaligh Islam yang mula-mula itu selain sebagian penyiara agama Islam juga sebagai saudagar.
- f. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa Indonesia. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada saat perlawanan rakyat melawan penjajah bangsa asing dan daya tahannya mempertahankan karakter tersebut selama dalam zaman penjajahan Barat dalam kurun waktu 350 tahun.⁷⁰

Jika masuknya orang Islam yang pertama di Indonesia itu ditetapkan pada abad ke-1 Hijriah, maka mereka itu dalam pengamalan agamanya beraliran Al Salaf al Saleh (golongan angkatan pertama = terdahulu yang saleh-saleh). Pada abad ke-1 Hijriah belum dikenal adanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi.⁷¹

2. Tempat Pertama Kali Islam Masuk ke Indonesia

Dalam hal tempat pertama kali Islam masuk ke Bumi Nusantara masih juga banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pertama masuknya di Pulau Jawa dan ada juga yang mengatakan di Barus, namun terlepas dari dimana tempat masuknya Islam pertama di Indonesia para ahli sejarah pada umumnya sependapat yang bahwa Islam yang masuk ke Bumi Nusantara langsung dari tanah Arab melalui Pesisir Sumatera Utara. Pentingnya Pesisir Sumatera Utara bagi persinggahan pelayaran antara Arab dengan Asia Timur memperkuat penafsiran atau pendapat tersebut. Para saudagar dan mubaligh yang berlayar di Asia Timur melalui Selat Malaka perlu untuk singgah di pantai Sumatera Utara untuk mempersiapkan perbekalan seperti air minuman, makanan dan lain sebagainya. Mereka yang singgah di daerah tersebut membentuk

⁷⁰*Ibid.*, h. 133-134. Lihat juga Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam "Perubahan Konsep, filsafat dan Metodologi dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 211-212. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 349.

⁷¹*Ibid.*, h. 134.

suatu komunitas masyarakat Muslim dan untuk selanjutnya mereka menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk pribumi beserta menyebarkan Islam sambil berdagang.⁷²

Menurut Hamka yang beliau termasuk ke dalam anggota seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia menyebutkan bahwa tempat asal masuknya agama Islam ke Indonesia langsung dari tanah Arab yaitu Mekkah. Kemudian Hamka membuktikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i yang sejak semula dianut di Indonesia sampai berkembang di tanah Nusantara ini membuktikan yang bahwa Agama Islam yang ada di Indonesia ini didatangkan langsung dari Bumi Mekkah. Alasan beliau adalah karena Raja-raja yang ada di Pasai disebutkan dengan gelar "*al-Malik*" dan bukan dengan gelar "*Shah*" atau "*Khan*" seperti tradisi gelar-gelar Raja Persia di India. Besar sekali kemungkinan yang bahwa pemakaian gelar "*al-Malik*" di Pasai itu berarti sangat erat hubungannya dengan Mesir, sebab gelar-gelar Raja sesudah keturunan Salahuddin semua memakai gelar "*al-Malik*".⁷³

Kesimpulan Hamka dalam seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia yang di adakan di Medan tahun 1963 menyebutkan bahwa:⁷⁴

- a. Agama Islam telah berangsur masuk ke tanah air kita ini sejak abad pertama Hijriah (abad VI) dibawa oleh saudagar-saudagar Islam yang intinya ialah orang-orang Arab diikuti oleh orang Persia dan Gujarat.⁷⁵
- b. Oleh sebab penyebaran Islam itu tidak dijalankan dengan kekerasan dan tidak ada penaklukan negeri, maka jalannya itu adalah berangsur-angsur.

⁷²Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 212.

⁷³*Ibid.*, h. 213.

⁷⁴Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 350-351.

⁷⁵*Ibid.*

- c. Mazhab Syafi'i telah berpengaruh sejak semula perkembangan itu, sampai Raja Islam Pasai Samudera itu menjadi seorang ahli fiqh Mazhab Syafi'i.⁷⁶
- d. Kedatangan ulama-ulama Islam dari luar negeri ke Aceh memperteguh ideologi Mazhab Syafi'i yang telah ditanam raja-raja Pasai.⁷⁷

3. Cara Masuknya Islam ke Indonesia

Mengenai cara masuknya agama Islam ke Indonesia adalah dengan dibawa oleh para saudagar yang beragama Islam, baik mereka berkebangsaan Arab, Persia, India maupun Indonesia sendiri, karena bangsa Indonesia juga adalah bangsa pelaut dan pedagang terkenal sejak dahulu kala di Asia Tenggara. Tetapi yang jelas Islam dimasukkan oleh para saudagar, baik mereka sebagai pedangan maupun sebagai mubaliq karena di dalam agama Islam antara tugas penyebaran Islam dengan perkembangan atau jabatan adalah sukar sekali untuk dipisahkan.⁷⁸

Menurut Azyumardi Azra, sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis menyebutkan bahwa, hubungan pergaulan antara pedangan Muslim dengan penduduk setempat pada akhirnya dapat menarik hati penduduk pribumi sehingga banyak di antara penduduk pribumi yang berhijrah ke agama Islam dan menjadi seorang Muslim.⁷⁹

4. Corak Perkembangan Islam

Pengembangan dan penyiaran agama Islam termasuk paling dinamis dan cepat dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Hal tersebut diukur dengan kurun waktu yang singkat dan dengan alat komunikasi dan transportasi yang sepadan. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa Islam dalam kurun waktu 23 tahun dari kelahirannya telah mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 214. Lihat juga Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 353-355.

⁷⁹*Ibid.*, h. 214.

yaitu Jazirah Arab. Misalnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Islam telah masuk secara potensial di Syam Palestina, Mesir dan Iraq. Lebih jauh lagi ketika ke pimpinan Khalifah Usman bin Affan, Islam telah masuk ke negeri-negeri bagian Timur sampai ke Tiongkok yang dibawa oleh para pedagang pada zaman dinasti Tang.⁸⁰

5. Sebab-sebab Penyebaran Islam Begitu Cepat

Pembahasan diatas disebabkan karena ada banyak faktor positif dari Islam, sehingga agama Islam begitu cepat mewabah ke seluruh penjuru dunia, antara lain faktor positif yang dibawa oleh Islam itu adalah:⁸¹

a. Faktor Ajaran Islam

- 1) Ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, syariat dan akhlaknya sangat mudah untuk dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, dapat diamalkan secara luas dan ringan, selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw yang artinya “*mudahkanlah dan jangan dipersulit*”.⁸²
- 2) Ajaran Islam bersifat “*Rahmatanli al-alamini*”, kedatangan tidak menggusir adat dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masuk dan berkembangnya Islam di tengah adat dan budaya yang ada hubungannya dan sejalan dengan pola yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.⁸³ Sebagaimana Firman Allah Q.S. al-Anbiya’/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء ١٠٧)

⁸⁰*Ibid.*,

⁸¹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 126-127. Lihat juga Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 214.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.*⁸⁴

- 3) Ajaran Islam yang tidak mengenal adanya perbedaan status dalam masyarakat dan tidak mengenal adanya kasta-kasta seperti dalam ajaran Hindu, ini juga menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi masyarakat golongan bawah sehingga mereka berbongdong-bondong masuk kedalam agama Islam.⁸⁵

b. Faktor Tempat Lahirnya

- 1) Jazirah Arab lokasinya sangat strategis yaitu ditengah persimpangan antara benua-benua Afrika, Eropa, Asia bagian Utara dan Asia bagian Timur. Bangsa-bangsa yang berada di sekitar Jazirah Arab itu sudah terkenal memiliki kebudayaan yang maju, misalnya bangsa Mesir, Ethiopia, Syiria, Romawi Timur, Persia, India dan lain sebagainya, sehingga penyebaran Islam dengan mudah sampai kepada mereka.⁸⁶
- 2) Arab itu disebut jazirah (pulau) karena hampir seluruh tanahnya dikelilingi oleh perairan secara langsung, yaitu oleh Laut Tengah, Laut Merah, Samudera Hindia, Teluk Parsi (Teluk Arab) dan dua buah sungai besar yaitu sungai Everat dan sungai Tigris. Walaupun demikian jazirah Arab mempunyai hubungan darat dengan benua-benua yang ada disekitarnya. Dengan demikian maka hubungan Arab dengan dunia luar dapat ditempuh dengan jalan laut maupun darat. Sejak dahulu

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), h. 331.

⁸⁵*Ibid.* lihat juga Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 215.

⁸⁶*Ibid.*

Kafilah Arab berdagang melalui darat dan melalui laut sudah dikenal dimana-mana.⁸⁷

- 3) Arab yang terdiri dari padang pasir yang tandus dan gunung-gunung berbatu, hanya sebagian kecil saja yang tanahnya subur dan dapat di tumbuhi tanaman. Keadaan yang demikian itu memaksa kepada penduduknya untuk mencari penghidupan dengan cara perdagangan. Pertanian, perkebunan dan perternakan tidak dapat mencukupi kebutuhan dari penduduknya. Jadi semenjak dulu orang Arab sudah terbiasa melakukan perjalanan keluar negerinya untuk kepentingan perdagangan. Lihat saja Nabi Muhammad pada waktu masih muda pernah Beliau pergi keluar negeri dua kali (ke negeri Syam) untuk berdagang. Perdagangan dilakukan oleh bangsawan suku Quraisy yang berkuasa baik dalam bidang politik maupun ekonomi.⁸⁸

Bersamaan dengan perdagangan yang dilakukan oleh orang Arab, dengan itulah Islam ikut terbawa keluar daerah Makkah. Kelompok pedagang adalah yang paling sering melakukan interaksi dengan orang/pembeli dari bangsa lain. Para pedagang biasanya mempunyai sikap yang ramah-ramah dan santun, sehingga Islam mewabah kepada pembeli.⁸⁹

- 4) Iklim di Jazirah Arab pada umumnya sangat panas dan kering pada musim kemarau tiba. Udara disana bisa mencapai 50 derajat atau bahkan lebih bila siang menghampiri, lain halnya diwaktu malam yang menggigil kedinginan merasuk ke tulang-tulang. Oleh karena itu bangsa Arab di Jazirah Arabia sudah terbiasa

⁸⁷Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 128.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*, h. 129.

hidup di suhu udara yang bermacam-macam, baik udara panas, sedang maupun udara dingin. Kondisi ini sangat besar artinya bagi para mubaligh Islam, mereka apabila dikirimkan keluar daerah tidak akan mengalami kesulitan tentang iklim, sehingga mereka tidak terganggu kesehatan rohani dan jasmaninya. Mereka dapat bertahan dan mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mereka tempati.⁹⁰

c. Faktor Penyiaran Islam

- 1) Penyiaran Islam dilakukan oleh para da'i dengan perkataan yang mudah dipahami dan pada umumnya dapat dimengerti oleh golongan bawah sampai golongan atas, hal ini sesuai dengan Hadis Nabi yang artinya "*Berbicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka*".⁹¹
- 2) Penyiaran Islam yang dilakukan oleh para da'i dilakukan dengan bertahap-tahap dan mudah untuk dipahami, sedikit demi sedikit, bahkan bagi mereka yang sudah mengucapkan kalimat Tauhid sudah dianggap masuk Islam.⁹²
- 3) Penyiaran Islam dilakukan dengan sopan, lemah lembut, bijaksana dan tidak ada pemaksaan bagi orang untuk mengikutinya. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Qur'an* yang tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam.⁹³

6. Kontak Pengembangan Masyarakat Islam

⁹⁰ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 128-130. Lihat juga Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 216-217.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Pengembangan masyarakat Islam yang pertama di Indonesia dengan cara:

a. Kontak Jual Beli

Para penyiari Islam pada umumnya adalah perantaraan dan pedagang. Pada umumnya pedagang perantau bersikap ramah, ulet bekerja keras dan sederhana. Sambil berdagang mereka menyiarkan Islam ajaran Tauhid kepada masyarakat yang berhubungan dengan mereka.⁹⁴

b. Kontak Perkawinan

Para penyiari Islam banyak yang menikah dengan penduduk pribumi. Dari hasil perkawinan tersebut lahir keturunan yang Islami, sesuai dengan agama kedua orang tuanya.⁹⁵

c. Kontak Kepribadian

Para penyiari Islam banyak melakukan dakwah dengan kepribadian yang dapat dijadikan panutan (*Uswatun al Hasanah*), karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Para ulama/mubaligh adalah pewaris para nabi".⁹⁶

d. Kontak *Dakwah bi al-Hal*

Para penyiari Islam tidak hanya menyiarkan dakwah secara lisan, tetapi juga diikuti pengamalan lahiriah, sehingga masyarakat menyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya.⁹⁷

e. Kontak Kekuasaan

Para penyiari Islam dapat mengislamkan para raja, dan raja dengan kekuasaannya berusaha pula untuk

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

mengislamkan para penduduk yang ada di bawah kekuasaannya. Islamnya raja-raja dapat juga mempengaruhi raja-raja di tempat lain sehingga ikut memeluk agama Islam juga. Sehingga Islam berkembang dengan cepat. Kemudian setelah berdirinya kerajaan Islam biasanya sang penguasa membuat berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai dari dakwah Islam, pembagunan mesjid-mesjid sampai penyelenggaraan pendidikan Islam. Perhatian raja-raja Muslim terhadap pendidikan Islam membuat pendidikan Islam berkembang maju yang dapat menawarkan pelayanan mengajar keagamaan maupun kemajuan intelektual Islam di Nusantara.⁹⁸

Dari berbagai macam teori yang telah penulis sebutkan diatas dapat kita ambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, mungkin saja benar bahwa Islam sudah diperkenalkan dan masuk ke Indonesia pada abad 1 H, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arnold dan di dukung oleh sebagian besar sarjana Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi proses islamisasi baru mengalami kemajuan pada abad ke-11 dan ke-12 M. *Kedua*, mungkin benar bahwa Islam dibawa langsung dari Arab melalui pedagang Arab, tapi peran pedagang muslim India tidak dapat dinafikan. *Ketiga*, islamisasi dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi mengalami kemajuan dan pengaruh yang luar biasa setelah melalui kalangan elit politik.

B. Latar Belakang Lahirnya Organisasi Islam

Umat Islam dan juga non Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrumen lahiriyah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang sebagai lebih dari sekedar agama. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai masyarakat madani, peradaban yang lengkap bahkan ada yang memandang sebagai agama dan

⁹⁸*Ibid.*, h. 218.

negara.⁹⁹ Yang melandasi rumusan-rumusan ini adalah pandangan yang luas yang diterima bahwa Islam mencangkup semuanya bahkan lebih dari sekedar sistem teologi dan moral. Lebih jauh lagi, pandangan ini menyatakan bahwa Islam tidak mengakui dengan adanya tembok pemisah antara agama dan negara, melainkan Islam mengatur semua aspek kehidupan.¹⁰⁰

Perkembangan sejarah tentang keberadaan Islam di Indonesia pada dua dasawarsa terakhir abad ke-19 dan lagi-lagi pada pertengahan abad ke-20, dimana masa ini dikenal sebagai masa dimana negara Islam dijajah oleh bangsa Barat, sehingga negara Islam harus mencari jalan keluar untuk mempertahankan dan melawan para penjajah tersebut. Pada masa inilah merupakan masa keemasan bagi bangsa Barat, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk memperluas kekuasaannya serta mengambil apasaja yang menguntungkan bagi mereka.¹⁰¹ seperti halnya negara Inggris dan negara Prancis, mereka berkuasa dibagian Benua Afrika dan Benua Asia, bahkan mereka memaksa dan mengancam rakyat yang telah merdeka untuk tunduk kepada mereka dan dijadikannya sebagai wilayah jajahannya. Sementara negara Belanda, mereka memasuki wilayah Nusantara.¹⁰²

Belanda menghadapi kenyataan politik yang berat dalam ekspansinya di Nusantara. Tekat yang kuat dan keras untuk berkuasa memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk menemukan bentuk politik yang digunakan oleh golongan Islam agar mudah dalam penaklukkannya. Dalam peperangan untuk menaklukkan wilayah nusantara, Belanda pada kenyataannya mendapat perlawanan yang tidak ringan dari penduduk Nusantara terlebih-lebih dari golongan Islam, sehingga tidak mengherankan bagi kita apabila kemudian Islam dipandang sebagai golongan

⁹⁹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan 'Studi Tentang Pencatutan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 15.

¹⁰⁰Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 61.

¹⁰¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: UI-Press, 1985), h. 91-94.

¹⁰²*Ibid.*

yang harus dikekang dan ditempatkan dibawah pengawasan ketat, serta dianggap sebagai penghalang utama dalam menjajah Nusantara ini.¹⁰³

Perlawanan yang sengit yang terjadi antara penduduk pribumi dengan Belanda seperti terlihat dalam peperangan yang terjadi di Paderi (1821-1827), peperangan Diponegoro (1825-1830), yang akhirnya peperangan yang terjadi di bumi Aceh (1873-1903). Di mana peperangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh agama. Gerakan-gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan dan berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bangsa. Seperti yang dicatat oleh seorang orientalis Barat George Mc Turnan Kahim dalam karyanya yang berjudul “*Nationalism and Revolution in Indonesia*” menyebutkan bahwa “Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional dalam menentang kolonialisme Belanda, bukan saja itu lanjutnya Islam juga merupakan simbol kebersamaan nasib menentang penjajah asing dan penindas yang berasal dari agama lain.”¹⁰⁴

Senada dengan diatas Effendy juga mengutip dari Fred R. von der Mehden dalam bukunya karangannya “*Islam and the Rise of Nationalism in Indonesia*” yang mengatakan;

Islam merupakan sarana yang paling jelas baik untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Pulau-pulau yang mencangkup Hindia Belanda tidak pernah ada sebagian sebuah kesatuan linguistik, kultural atau historis. Daerah-daerah yang terakhir jatuh ke dalam kekuasaan Belanda tidak pernah tunduk sepenuhnya hingga awal abad ke-20. Oleh sebab itu, karena terdiri dari berbagai tradisi historis, linguistic, kultural dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang tersedia, di luar kekuasaan kolonial adalah Islam.¹⁰⁵

Perlu kita ketahui juga bahwa pihak Belanda sangat khawatir terhadap orang-orang Islam yang fanatik, namun setelah kedatangan Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1889 barulah pemerintah Hindia Belanda mempunyai satu kebijakan yang jelas mengenai Islam. Menurut Christian Snouck Hurgronje sebagaimana yang dikutip oleh Rizki dalam bukunya Harry J. Benda yang

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Effendy, *Islam Dan Negara*, h. 62.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 63.

berjudul *The Crescent and The Rising Sun 'Indonesia Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*, menyebutkan bahwa dalam Islam tidak dikenal dengan adanya lapisan masyarakat seperti kependetaan dalam agama Kristen, artinya kiyai tidak apriori fanatik, penghulu merupakan bawahan dari pemerintah pribumi dan bukan atasannya. Mereka melakukan ibadah haji ketanah suci Mekkah bukan berarti mereka fanatik, tetapi memang bagi umat Islam segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah merupakan suatu kewajiban, lebih jauh dari itu dengan media ibadah menjadikan umat Islam semakin kokoh dalam tali persaudaraan antar sesamanya.¹⁰⁶

Permasalahan Islam sebagai suatu dasar persatuan telah menimbulkan suatu ikatan batin yang sangat erat diantara sesama umat Islam di Nusantara. Hal ini penting untuk kita ketahui sebab berhubungan dengan perkembangan kekuasaan Belanda ke seluruh pelosok penjuru tanah air. Hendaknya perlu juga penulis ingatkan bahwa Pemerintahan Belanda hanya secara berangsur-angsur dapat menguasai wilayah Nusantara. Seperti di Jawa misalnya, penerobosan kekuasaan Belanda ke daerah-daerah pedalaman hampir total semuanya, tetapi pemberontakan-pemberontakan masih saja terjadi disana, seperti pemberontakan Pangeran Diponegoro (1825-1830). Tetapi Aceh masih snaggup untuk mempertahankan kemerdekaannya dari kolonial Belanda, bahkan Aceh membangun kerajaan terbesar di Asia Tenggara sampai pada abad ke-20.¹⁰⁷

Jauh sebelum semua ini terjadi, keinginan dan pemikiran akan pembentukan organisasi Islam itu muncul terutama sebagai hasil dari kontak sosial yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya kontak ini, umat Islam pada abad ke-19 sadar bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Sebelum periode modern, kontak sebenarnya sudah ada, terlebih-lebih antara Kerajaan Usmani yang mempunyai daerah kekuasaan di

¹⁰⁶ Riski Pristiandi Harahap, *Islam Politik di Indonesia 'Analisis Historis Tentang Pergerakan Politik Masyumi (1945-1960)*, Tesis di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014, h. 23-24. Lihat juga Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun 'Indonesia Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945* (Forish Holand: Publication, 1983), h. 21.

¹⁰⁷ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 184.

dataran Eropa dengan beberapa negara Barat. Diketika dunia Barat mulai memasuki masa kemajuan Kerajaan Usmani malah sebaliknya, mereka mulai memasuki masa kemunduran. Dulunya Kerajaan Usmani selalu menang dalam setiap peperangan, tetapi akhirnya mereka mengalami kekalahan demi kekalahan di tangan Barat.¹⁰⁸

Islam politik di Indonesia telah menciptakan pola hidup baru, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun yang bersifat kerakyatan. Pertumbuhan politik dikalangan umat Islam di wilayah Nusantara dapat di indentikkan dengan asal mulanya muncul Sarekat Islam (SI). Pada awal lahirnya organisasi ini merupakan simbol dari kebangsaan atau kebumi puteraan bagi penganut Islam dalam perjuangan yang berbentuk ideologi politik. Sehingga Islam telah membentuk tali persaudaraan sesama bangsa atau rasa kebangsaan. Lain halnya dengan Budi Oetomo, organisasi ini tidak membuka diri untuk rakyat biasa, mereka lebih condrong mencari anggota dari para bangsawan.¹⁰⁹

Mengingat kenyataan tersebut, sebagian masyarakat menganggap Budi Oetomo kurang menampung aspirasi rakyat, oleh karena itu muncul dan lahir lah organisasi-organisasi lain yang menjadi wadah penampungan aspirasi bagi rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya.¹¹⁰

Dari perkembangan organisasi-organisasi Islam yang akan penulis sebutkan nanti di poin selanjutnya, menurut Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, setidaknya ada dua fenomena yang terjadi pada decade-dekade awal abad ke-20 tersebut.¹¹¹

Pertama, berdirinya organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberi pendidikan politik bagi umat Islam supaya mereka mengerti dan memperjuangkan hak-hak mereka. hal ini bisa kita lihat ketika didirikannya organisasi Sarekat Islam, Permi dan PSI.¹¹²

¹⁰⁸Nasution, *Islam Ditinjau Dari*, h. 92.

¹⁰⁹Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h, 272-275. Lihat juga Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h, 50-51.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

Kedua, ada juga organisasi yang berdiri dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengadakan pembaharuan keagamaan dalam Islam, seperti Muhammadiyah dan Persis. Gerakan organisasi modern ini akhirnya mendapatkan respons dari kalangan tradisi untuk mempertahankan pendirian mereka dengan mendirikan NU dan Perti.¹¹³

Terlepas dari perbedaan pandangan yang terjadi dalam organisasi tersebut, akan tetapi dalam perjuangan melawan bala tentara Belanda dan Jepang mereka memiliki kesamaan dan kesepakatan untuk membebaskan bangsa ini dari penindasan yang dilakukan oleh para penjajah. Bagi mereka, umat Islam juga harus bebas menjalankan ajaran-ajaran agamanya dan tidak boleh ada intimidasi dan paksaan-paksaan dari pihak asing. Mereka memperjuangkan agar umat Islam menyatu dalam kehidupan umatnya. Dalam perkembangan berikutnya, organisasi-organisasi Islam itu bersatu dalam sebuah wadah untuk memperjuangkan cita-cita pembumih ajaran-ajaran Islam kedalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹¹⁴

Lebih lanjut lagi, menurut Steenbrink sebagaimana yang di kutip oleh M. Mukhsin Jamil dan kawan-kawan menyebutkan bahwa, setidaknya terdapat empat faktor penting yang mendorong “perubahan Islam” pada saat itu. *Pertama*, adanya tekanan kuat untuk kembali kepada ajaran al-Quran dan Hadits, yang keduanya dijadikan landasan berfikir untuk menilai pola keagamaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, Kuatnya semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Gerakan perlawanan ini banyak direalisasikan oleh kelompok nasionalis yang terus berusaha menentang kebijakan Belanda, tetapi mereka juga enggan menerima gerakan pan-islamisme. *Ketiga*, kuatnya motivasi dari komunitas muslim untuk mendirikan organisasi di bidang sosial-ekonomi yang diharapkan bermanfaat demi kepentingan mereka sendiri, maupun kepentingan publik. *Keempat*, gencarnya upaya dalam memperbaiki pendidikan Islam.¹¹⁵

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴M. Mukhsin Jamil, dkk, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis dan NU* (Jakarta: Fahmina Institute, 2008), h. 113-114.

¹¹⁵*Ibid.*

C. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa umat Islam yang ada di tanah Nusantara ini memegang peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang di berbagai sudut wilayah Nusantara bisa dikatakan sebagai perlawanan umat Islam terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan, penindasan, pelecehan, perendahan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap rakyat Nusantara. Ini juga berarti perlawanan tersebut merupakan upaya yang tidak mengenal kata menyerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan Islam, karena Islam adalah agama yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh hampir seluruh rakyat Nusantara ini.¹¹⁶

Karena itulah, maka pada awal-awal abad ke-20 sejarah mencatat bahwa berbagai macam organisasi-organisasi Islam lahir baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun sosial keagamaan. Diantara organisasi-organisasi yang lahir pada saat itu, beberapa diantaranya akan penulis paparkan nanti di bawah.¹¹⁷

Setelah perjuangan rakyat Muslim dalam memperjuangkan Islam di Nusantara yang tidak mahu menyerahkan kedaulatannya kepada kekuasaan kolonial Belanda, sehingga dengan demikian ada sebagian daerah Nusantara yang belum bisa diduduki sepenuhnya oleh Belanda yang dalam arti kata lain yang masih merdeka yaitu Aceh. Setelah Islam sedikit kuat di bumi Nusantara ini sehingga terbentuklah beberapa organisasi Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan Islam. Adapun organisasi tersebut antara lain adalah:¹¹⁸

1. Partai Syarikat Islam Indonesia

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) adalah sebuah partai politik tertua di Indonesia, partai ini berdiri pada tahun 1911 dengan nama awalnya Syarikat Dagang Islam (SDI) di bawah pimpinan seorang tokoh Islam terkemuka Haji Samanhudi. Kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam (SI) yang selanjutnya dipimpin oleh

¹¹⁶Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 271.

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 369-376.

Haji Umar Said Cokroaminoto yang kemudian terkenal dengan sebutan Bapak Pergerakan Indonesia”. Kemudian berubah nama lagi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).¹¹⁹

Partai Syarikat Islam Indonesia ini memiliki lapangan kerja yang sangat banyak, organisasi ini juga bergerak dalam bidang ekonomi, pendidikan dan juga sosial. Karena itu, organisasi ini mempunyai syarikat-syarikat dagang, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dan juga pesantren-pesantren. Adapun gerakan pemudanya diberi nama Pemuda Muslim Indonesia (PMI), pemerintahan Hindia Belanda sangat memusuhi organisasi ini sehingga banyak pemimpin-pemimpinya yang dipenjarakan sampai dihukum mati.¹²⁰

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah juga salah satu organisasi yang tidak kecil yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiyai H.A. Dahlan dan kawan-kawannya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah/18 November 1912. Pada tanggal 20 Desember 1912, pembentukan Muhammadiyah secara resmi diumumkan dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat dan kerabat Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.¹²¹ Tujuan utama dari organisasi ini adalah menegakkan dakwah islamiah dalam arti seluas-luasnya. Adapun bidang usahanya banyak yang mencakupi bidang-bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah.¹²² Firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran/3: 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران. ١٠٤)

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, h. 369.

¹²¹ Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 29.

¹²² *Ibid.*, h. 17

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf¹²³ dan mencegah dari yang mungkar¹²⁴. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. 3:104).¹²⁵

Dari ayat inilah timbul kesadaran dari Dahlan untuk membangun sebuah perkumpulan (perserikatan) yang rapi yang bertugas berkhidmat mengabdikan, melaksanakan misi dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* di tengah-tengah masyarakat, dan akhirnya ayat ini pula yang menginspirasi Dahlan untuk mendirikan perserikatan Muhammadiyah.¹²⁶

Organisasi ini juga banyak mempunyai sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, rumah-rumah sakit, balai-balai pengobatan, rumah-rumah penyantunan, surat kabar dan majalah. Gerakan wanita dalam organisasi ini dinamakan Aisyiyah, sedangkan gerakan pemuda bernama Pemuda Muhammadiyah. Gerakan keaduannya dinamakan Hizbul Wathan (HW).¹²⁷

Muhammadiyah bersemboyan: “*sehari sehelai benang, lama-lama menjadi kain*”. Dengan semboyan yang diagungkan inilah organisasi ini banyak yang berhasil baik dalam membangun usaha-usahanya.¹²⁸

3. Kongres Al Islam dan Majelis Islam A'la Indonesia

Organisasi ini didirikan pada bulan September 1937, dibangun oleh beberapa tokoh terkenal, diantaranya ada KH. Wahab Chasbullah (NU), Mas Mansur (Muhammadiyah) dan Wondoamiseno (PSSI).¹²⁹ Kongres ini dipelopori oleh PSII dan Muhammadiyah, pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2

¹²³Makruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹²⁴Mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah SWT.

¹²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), h. 63.

¹²⁶Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 27.

¹²⁷Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 372.

¹²⁸*Ibid.*, h. 369.

¹²⁹Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 203

November 1922, diadakanlah Kongres Al Islam pertama sekali di Cirebon, Kongres ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya persatuan aliran dan bersama antara semua kaum muslim dan semua organisasi-organisasi Islam terhadap masalah-masalah yang hangat mengenai agama Islam. Kemudian kongres ini diadakan secara berturut-turut dengan diadakannya kongres kedua pada tahun 1923 di Garut, ketiga pada tahun 1924 di Surabaya, keempat pada tahun 1925 di Yogyakarta, kelima pada awal bulan Februari dan yang keenam pada bulan September tahun 1926 di Bogor, ketujuh pada awal bulan Januari pada tahun 1927 di Pekalongan, kedelapan di adakan di Surabaya pada tahun 1931 dan yang terakhir di adakan di Malang pada tahun 1932.¹³⁰

Gagasan pemikiran Natsir¹³¹ banyak diarahkan kepada persoalan pembentukan negara Islam, penempatan konsep demokrasi dan perbedaan antara nasionalisme dan Islam. Semua ini dilakukannya karena Natsir menghendaki terwujudnya Indonesia yang berasaskan Islam.¹³²

Perlu untuk diketahui juga yang bahwa MIAI pada awal-awalnya dia lahir organisasi ini tidak berpolitik, namun ia selalu ikut aktif dalam aksi-aksi politik yang digerakkan oleh Gabungan Partai-partai Indonesia (GAPI) dan Majelis Rakyat Indonesia. Pada akhirnya organisasi ini dibekukan oleh Pemerintah Jepang karena Jepang takut akan pergerakan yang dilakukan oleh organisasi ini.¹³³

4. Al Isyad al Islamiyah

Al Isyad merupakan satu perkumpulan Islam yang didirikan di Jakarta pada tanggal 6 September 1914, selisih dua tahun setelah organisasi Muhammadiyah dideklarasikan. Organisasi ini didirikan oleh beberapa orang keturunan Arab, yaitu Ahmad Surkati, Syaikh

¹³⁰Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 372.

¹³¹Tentang nasir, ada sedikit penulis tempatkan di lampiran VI, h. 126.

¹³²Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 203

¹³³*Ibid.*

Umar Mangqush, Said Mash'abi, Saleh Ubayd Abat dan Salim bin Alwad Bawa'i.¹³⁴

Organisasi ini dipelopori oleh Ahmad Surkati orang Indonesia Muslim keturunan Arab. Surkati lebih bersemangat dalam melakukan gerakan pembaharuan Islam. Beserta kedua teman dekatnya, yaitu KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) dan Haji Zamzam (Perintis Persis), Ahmad Surkati berjanji untuk berdakwah tak kenal lelah dengan melakukan pembaharuan Islam. Supaya dakwah mereka lebih efektif dan efisien, mereka membagi peran. Ahmad Dahlan dan Haji Zamzam konsentrasi dalam melakukan dakwah untuk kalangan pribumi, sedangkan Surkati melakukan dakwahnya pada komunitas keturunan Arab.¹³⁵

Al Isyad bergerak terutama dalam pendidikan dan dakwah. Adapun tujuan utama dari didirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah Al Isyad untuk mengajarkan, mendidik rakyat agar pandai dalam berbahasa Arab sebagaimana bahasa Al-Qur'an.¹³⁶

Tidak sedikit alumni-alumni dari sekolah ini yang berhasil dan pandai-pandai dalam bahasa Arab dan memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang ilmu-ilmu Islam, mereka banyak yang berpikiran maju dan modern.¹³⁷

5. Jong Islamieten Bond

Jong Islamieten Bond yaitu suatu Ikatan Pemuda Islam yang didirikan pada tahun 1925 oleh para terpelajar Islam, yang diketuai oleh R. Sam, sedangkan penasehatnya diangkatlah Haji Agus Salim. Gerakan ini sangat besar pengaruhnya di kalangan pemuda pada masa itu dan dari organisasi ini juga banyak lahir pemimpin-pemimpin Islam yang besar pengaruhnya seperti Mr. Mohamad

¹³⁴*Ibid.*, h. 114-115.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 370.

¹³⁷*Ibid.*

Roem, dr. Sukirman, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. Yusuf Wibisono, dan lain-lain.¹³⁸

6. Nahdhatul Ulama

Berdirinya NU berawal dari terbentuknya komite Hijaz yang dipelopori oleh Abdul Wahab Hasbullah. Tujuan dari pembentukan komite Hijaz adalah untuk mengirim delegasi menghadiri Mukhtamar Islam di Mekkah. Setelah komite ini menetapkan delegasi yang akan diberangkatkan kesana maka kebutuhan yang selanjutnya adalah membuat lembaga atau institusi yang berhak mengirim delegasi tersebut. Untuk itu dibentuklah sebuah organisasi baru yang disebut dengan Nahdlatul Ulama.¹³⁹

Nahdhatul Ulama adalah salah satu organisasi yang lahir di tanah Surabaya yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Adapun lapangan usahanya meliputi bidang pendidikan, sosial dan dakwah. NU mempunyai pesantren-pesantren yang banyak sekali, bahkan pesantren-pesantren yang berpengaruh di tanah Jawa pada umumnya kepunyaan NU. Angkatan muda dari organisasi ini diberinama Pemuda Ansor dan banyak sekali alumni-alumni yang tamatan dari pesantren-pesantren dari NU ini menjadi ulama-ulama besar, juga tidak sedikit yang menjadi pemimpin Islam yang terkemuka.¹⁴⁰

7. Persatuan Islam

Persatuan Islam juga biasa disebut dengan sebutan Persis, Persis ini didirikan di Bandung sekitar tahun 1926 oleh para ulama yang berpaham baru yang sering disebut dengan paham Wahaby yang dipelopori oleh Ahmad Hassan, Mohammad Munawar Cholil dan Mahmud Aziz.¹⁴¹ Di lain buku organisasi ini berawal dari

¹³⁸*Ibid.*, h. 373.

¹³⁹Salbiah Siregar, *Nahdlatul Ulama (NU) Di Medan 'Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan dari 1950-2010'*, Tesis di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2011, h. 34.

¹⁴⁰Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 375-376.

¹⁴¹*Ibid.*, h. 373.

perkumpulan dari para saudagar dan pedagang yang biasa disebut dengan “urang pasar” di sebuah gang yang disebut dengan Gang Pakgade. Di gang inilah awal mulanya berdiri sebuah organisasi pembaharuan Islam yang bersemboyan “kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah, serta membersihkan Islam dari *khurafat*, *bid’ah* dan seluruh pemahaman yang mengotori kesakralannya. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 September 1923 oleh Haji Zamzam dan Haji Mohamad Yunus di Bandung.¹⁴² Organisasi ini sering berkecimpung dalam penerbitan buku-buku dan pendidikan lainnya.¹⁴³

8. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah didirikan pada tanggal 20 Mei 1930 di kota Bukittinggi oleh sejumlah ulama-ulama terkemuka di Minangkabau yang diantaranya Syekh Suleiman Rasuly, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Abbas Ladang Laweh, Syekh Abdul Wahid Salihy dan yang terakhir ada Syekh Arifin Arsyady. Organisasi ini lebih berfokus ke pendidikan dan dakwah.¹⁴⁴

9. Al Jam’iyatul Washliyah

Organisasi Islam yang diresmikan pendirinya pada tanggal 30 November 1930 bertepatan di Aula Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, yang dipelopori oleh beberapa ulama terkemuka antara lain ada Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, Arsyad Thahir Lubis, Adnan Nur, H. Syamsuddin, H. Yusuf Ahmad Lubis, H. A. Malik dan A. Aziz Efendi.¹⁴⁵

Organisasi ini mempunyai satu badan yang bernama “Sending Islam” yang sangat besar jasanya dalam pengislamisasikan

¹⁴²Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 179-182.

¹⁴³Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur’an*, h. 373.

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵*Ibid.*, h. 379.

masyarakat di Tanah Karo, Tapanuli Utara/Tengah dan Simelungun. Pemuda di organisasi ini diberi nama Washliyah.¹⁴⁶

10. Persatuan Muslimin Indonesia

Organisasi ini didirikan pada tahun 1932 di Tanah Minagkabau. Organisasi ini bergerak dalam bidang perpolitikan, pergerakan pemuda dalam organisasi ini bernama Himpunan Pemuda Islam Indonesia (HPII).¹⁴⁷

11. Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia

Sekitar tahun 1936, atas prakarsa beberapa orang pemuda Aceh yang baru menyelesaikan pendidikan di luar Aceh terutama di Sumatera Barat, maka di Banda Aceh didirikanlah sebuah organisasi pemuda yang diberinama Serikat pemuda Islam Aceh (SEPIA). Dua tahun kemudian berubah nama menjadi Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia (PERAMIINDO) perubahan ini terjadi dalam kongres pertamanya dan mengambil satu keputusan yang bertujuan memperluas ruang-lingkupnya.¹⁴⁸

Adapun pelopor dari organisasi Islam ini antara lain ada A. Jalil Amin, Said Abubakar, Muhammad Piyeueng, Thamrin Amin dan A. Hasjmy.¹⁴⁹

12. Persatuan Ulama Seluruh Aceh

Dalam rapat besar di ruang Aula Al Muslim Peusangan (Bireuen Aceh Utara) yang dihadiri oleh hampir seluruh ulama terkemuka yang ada di tanah rencong ini, rapat ini berlangsung pada tanggal 12 Rabiul Awal 1358 Hijriyah atau bertepatan 5 Mei 1939 dan akhirnya terbentuklah Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau biasa disebut dengan (PUSA). Diantara para ulama-ulama terkemuka yang hadir dalam rapat itu yang kemudian menjadi pengurus besarnya adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdur

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 374.

¹⁴⁸*Ibid.*, h. 378.

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 373.

Rahman Meunasah Meucap, Teungku Abdul Wahab Seulimeum, Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy, Teungku Ismail Yakub, Teungku Muhammad Amin (Abu Tumin), Teungku Syekh Haji Abdul Hamid Samalanga, Teungku Usman Lampo Awe, Teungku Yahya Baden Peudada, Teungku Mahmud Simpang Ulim, Teungku Ahmad Damanhuri Takengon, Teungku Muhammad Daud, Teungku Usman Aziz Lhok Sukon. Diantara para ulama yang menjadi pengurus besar organisasi Islam ini adalah Teungku Hasballah Indapuri, Teungku Haji Abdullah Lam U, Teungku Muhammad Amin Alue, Teungku Hasan Hanafiah, Teungku Zamzami Yahya Tapak Tuan, Teungku Amir Husin Al Mujahid.¹⁵⁰

Organisasi Islam ini bermaksud hendak membangun umat Islam Indonesia terutama di Aceh dalam segala bidang sesuai dengan ajaran Islam. PUSA yang berhaluan maju ini yang dalam waktu yang sangat singkat telah dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh. Dan dalam bulan Februari dan Maret 1942 PUSA bersama pemuda PUSA melakukan suatu perlawanan terhadap tentara Belanda yang meledak hampir diseluruh Aceh, sehingga tanpa perlawanan yang berarti tentara belanda dapat dipukul mundur hingga ke perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Dan ketika tentara Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942 tentara Belanda sudah tidak ada lagi di tanah Aceh sehingga Jepang menduduki Aceh tanpa ada pertempuran sedikitpun.¹⁵¹

13. Majelis Syura Muslimin Indonesia

Masyumi didirikan pada bulan Oktober 1943 oleh para pemuka agama yang berlatar belakang ormas Islam, Masyumi ini adalah kelanjutan dari MIAI yang dihidupkan kembali oleh Jepang setelah sempat dibekukan karena takut akan kekuatan yang ditimbulkan oleh organisasi Islam. Masyumi juga merupakan

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 378.

¹⁵¹*Ibid.*

sebagai lembaga politik Islam satu-satunya di Indonesia pada waktu itu.¹⁵²

Dalam keanggotaan Masyumi, Persis merupakan anggota istimewa di samping Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam berpolitik, Persis menggunakan otoritas lembaganya guna menginstruksikan pada seluruh rakyat untuk masuk ke dalam Partai Masyumi. Prinsip politik Persis adalah “*Semua orang Islam hendaklah berpolitik, sebab politik adalah salah satu kewajiban agama (Islam) untuk berjuang demi kemaslahatan umat*”.¹⁵³ Adapun tujuan pokoknya yaitu mengkoordinir organisasi-organisasi Islam yang telah ada. Pihak pimpinan bala tentara Jepang menghendaki untuk membantunya dalam perang melawan sekutu, sementara oleh pihak pemimpin-pemimpin Islam digunakanlah kesempatan itu untuk mempersatukan umat secara diam-diam.¹⁵⁴

Pada tahun 1949, Natsir dipercaya sebagai ketua Masyumi. Kepercayaan ini terus berlanjut sampai tahun 1956. Kondisi Masyumi mengalami kemunduran setelah tahun 1955. Tepatnya pada pemilu pertama yang di adakan tanggal 29 September 1955. Ketika itu tidak ada satu partaipun yang unggul dalam pemilu, baik PNI, NU, Masyumi maupun PKI, semuanya seimbang.¹⁵⁵

Setelah Poklamsi Kemerdekaan Indonesia, maka Masyumi dinyatakan sebagai partai politik Islam, sehingga dalam waktu yang relative singkat Masyumi berkembang sangat pesat dan timbullah cabang-cabang dan ranting-ranting di seluruh Indonesia yang kemudian ia menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia. Masyumi mempunyai gerakan wanitanya yang bernama Muslimat Masyumi dan gerakan pemudanya bernama Gerakan Pemuda Islam Indonesia.¹⁵⁶

¹⁵²Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 205-206.

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 378.

¹⁵⁵Mukhsin Jamil, *Nalar Islam Nusantara*, h. 206.

¹⁵⁶Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, h. 378.

Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam bukunya, *Dinamika Tatanegara Indonesia 'Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian'* menyebutkan bahwa kehadiran partai politik dalam sejarah Indonesia modern awal mulanya pada awal abad ke-20 M. sejalan dengan berbagai kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang banyak dipengaruhi oleh politik etnis dan berbagai asosiasi yang bercorak etnis, kebudayaan dan keagamaan yang bermunculan semenjak tahun 1905.¹⁵⁷ Partai-partai polotik ini bermunculan setelah Gubernur Jenderal Idenburg memberikan keleluasaan kepada Serikat Islam bergerak secara lokal, karena ia mengira organisasi ini tidak akan terlibat dalam aktifitas politik. Akan tetapi partai-partai lain pun bermunculan dalam kurun 1910-1930. Seperti Indische Partij, ISDV (yang kemudian berubah menjadi Partij Komunis Hindia) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927.¹⁵⁸

Semenjak 40 tahun lamanya partai-partai politik ini memberi kontribusi yang besar dalam menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia, walaupun partai-partai itu tumbuh dan berkembang berdasarkan ideologi politiknya yang berbeda-beda. Seperti halnya Organisasi Sarekat Islam yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia adalah partai-partai dengan berideologi politik Islam. PNI dan Partai Indonesia Raya (Parindra) berideologi Nasionalisme, sedangkan Partij Komunis Hindia mereka menjadi Partai Komunis Indonesia yang berideologi Komunisme.¹⁵⁹

Walaupun mereka memiliki visi misi politik yang berbeda-beda, namun partai-partai ini memiliki tujuan yang satu yaitu sama-sama berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Partai-partai ini menghimpun massa dalam jumlah yang tidak sedikit yang terkadang muncul sosok-sosok pemimpin politik dari kalangan bangsawan dan tokoh-tokoh agama sehingga terjadilah hubungan baik antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya, pemimpin-pemimpin inilah yang

¹⁵⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia 'Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian'* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 177-178.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

membawa Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Hingga saat Indonesia merdeka peranan kaum militer belum ada. Sebagaimana telah kita ketahui militer baru terbentuk setelah Indonesia merdeka, bukan merebutnya, melainkan mempertahankan kemerdekaan.¹⁶⁰

BAB III

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

A. Latar Belakang Lahirnya Pancasila

Pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang diumumkannya dua hal yang diperkirakan akan dapat membuat rakyat Indonesia gembira, adapun dua hal itu adalah;

1. Akan didirikannya *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau biasa disebut dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
2. Akan diperluuskannya pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan Jepang pada tanggal 7 September 1944.¹⁶¹

Sebagai realisasi janji yang telah di ucapkan dan telah di umumkan oleh Pemerintah Jepang tersebut, maka pada hari ulang tahun Kaisar Jepang “Tenno Heikal”, dikeluarkannya maklumat yang berisi pembentukan suatu badan yang diberinama *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau biasa disebut dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dan R.P. Soeroso sebgai wakil ketuanya.¹⁶²

Dengan nada yang sama menurut Muhammad Yamin sebagaimana yang dikutip oleh J.C.T. Simoangkir, S.H, menyebutkan, adapun nama-nama anggota-anggota BPUPKI tersebut adalah;

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 179.

¹⁶¹Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 42.

¹⁶²Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 16. Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960), h. 239. Lihat juga Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, h. 43.

1. Ir. Soekarno
2. Mr. Muhammad Yamin
3. Dr. R. Koesoemah Atmadja
4. R. Adoelrahim Pratalykrama
5. R. Aris
6. K.H. Dewantara
7. K. Bagoes H. Hadikoesoemo
8. B.P.H. Bintoro
9. A.K. Moezakkir
10. B.P.H. Poeroebojo
11. R.A.A. Wiranatakoesoemo
12. Ir. R. Asharsoetedjoe Moenandar
13. Oeij Tiang Tjoei
14. Drs. Moh. Hatta
15. Oeij Tjong Hauw
16. H. Agoes Salim
17. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
18. R.M. Margono Djojohadikoesoemo
19. K.H. Abdul Halim
20. K.H. Masjkoer
21. R. Soedirman
22. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
23. Prof. Dr. Soepomo
24. Prof. Ir. R. Rooseno
25. Mr. R. Pandji Singgih
26. Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso
27. R.M.T.A. Soerjo
28. R. Rooslan Wongsokoesoemo
29. Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo
30. Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito
31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

32. Liem Koem Hian
33. Mr. J. Latuharhary
34. Mr. R. Hindromartono
35. R. Soekardjo Wirjopranoto
36. Hadji Ah. Sanoesi
37. A.M. Dasaad
38. Mr. Tan Eng Hoa
39. Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo
40. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
41. K.R.M.T.H. Woerjaningrat
42. Mr. A. Soebardjo
43. Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakoesoemo
44. Abikoesoemo Tjokrosoejoso
45. Parade Harahap
46. Mr. R.M. Sartono
47. K.H.M. Mansoer
48. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat
49. Mr. R. Soewandi
50. K.H.A. Wachid Hasjim
51. P.F. Dahlen
52. Dr. Soekiman
53. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro
54. R. Oto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A. Maramis
59. Mr. R. Samsedin
60. Me.R. Sastromoeljono
61. Dr. K.R.T, Radjman Wediodiningrat

62. R.P.Soeroso.¹⁶³

Badan Penyelidikan ini mempunyai tugas-tugas khusus yang dibebankan atas mereka. Diantara tugas tersebut adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang dianggap penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan Indonesia yang merdeka di kemudian hari, termasuk soal-soal yang menyangkut dasar-dasar negara, Undang-undang Dasar dan pembelaan tanah air. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gunseikan dan Siakoo Sikikan pada upacara pelantikan anggota Badan Penyelidik. Pelantikannya berlangsung pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, badan ini menjalankan tugasnya yaitu sidang pertama yang jatuh pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945.¹⁶⁴

Ketika sidang pertama dilaksanakan, para anggota BPUPKI berinisiatif untuk membahas tentang dasar negara dan hal-hal yang berkenaan dengan pokok masalah dalam rangka mendirikan negara yang terlepas dari penjajah. Dari sekian banyak anggota BPUPKI dapat disimpulkan ada beberapa usul yang dikemukakan, diantaranya;

1. Memerdekakan Indonesia secepatnya
2. Meletakkan dasar negara
3. Mengenai bentuk negara dan kepala negara
4. Mengenai warga negara, batasan negara, soal agama dan soal keuangan.¹⁶⁵

Adapun usulan yang berkenaan dengan dasar negara banyak diusulkan oleh Prof. Mr. Muh. Yamin, Prof Dr. Soepomo dan Ir. Sukarno. Menurut catatan yang sering penulis dapatkan usulan yang pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau merumuskan lima usul dasar negara yang disampaikan secara lisan, adapun urutannya sebagai berikut;

¹⁶³J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD 'Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia'* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 10-11. Lihat juga Daman, *Pancasila Dasar Falsafah*, h. 43-44.

¹⁶⁴Daman, *Pancasila Dasar Falsafah*, h. 44.

¹⁶⁵*Ibid.*, h. 45.

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
 - a. Permusyawaratan
 - b. Perwakilan
 - c. kebijaksanaan
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)¹⁶⁶

Adapun yang disampaikan secara tertulis tercantum didalam rancangan pembukaan yang diusulkan kepada Badan Penyidik yaitu;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan – Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶⁷

Terhadap usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin baik secara lisan maupun tulisan, Muhammad Yamin tidak menyebutkan nama dari kelima usul yang disampaikannya. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945 beberapa tokoh Islam seperti K.H. Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Kahar Muzakkir mengusulkan agar dasar negara yang dipakai nantinya adalah dasar Islam, menginggat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi Bung Hatta yang juga mengusulkan agar negara yang terbentuk merupakan negara yang berdasarkan persatuan nasional, bukan berdasarkan satu agama tertentu.¹⁶⁸

Keesokan harinya Prof. Mr. Soepomo berkesempatan untuk mengusulkan usulannya dalam sidang tersebut, adapun usulannya dapat disarikan sebagai berikut,¹⁶⁹

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷*Ibid.*, h. 45-46.

¹⁶⁸*Ibid.*

¹⁶⁹*Ibid.*, h. 46-47.

1. Dasar Persatuan dan Kekeluargaan. Maksudnya, negara yang akan merdeka ini tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar saja, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil.
2. Dasar Ketuhanan, disini Soepomo mengharapkan agar rakyat ingat kepada Tuhan setiap waktu.
3. Dasar Kerakyatan / Permusyawaratan, agar dalam susunan pemerintahan nanti dibentuk sistem badan permusyawaratan agar rakyat dan pemimpin negara bisa bersatu.
4. Dasar Koperasi dalam Sistem Ekonomi, dia mengharapkan agar negara bersifat kekeluargaan, tolong menolong hingga Indonesia hidup dalam kesatuan, berdaulat, adil dan makmur.¹⁷⁰
5. Mengenai hubungan antar bangsa, diajukan supaya Indonesia bersifat sebagai Negara Asia Timur Raya yang masih ada kaitannya dengan Jepang.¹⁷¹

Ir. Sukarno mendapat kesempatan pada hari terakhir pada sidang pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengemukakan usulnya melalui pidato yang berbunyi;¹⁷²

“Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara Kebangsaan Indonesia itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti sempit, tetapi saya menghendaki satu nationalestaat. Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt., tinggal dikesatuannya pulau-pulau Indonesia dan ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalisme.” Tetapi jikalau saya katakana internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lain. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.

¹⁷⁰Daman, *Pancasila Dasar Falsafah*, h. 46-47.

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*, h. 48-49.

Kemudian apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua.” “satu buat semua, semua buat satu.” Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Prinsip nomor empat sekarang saya usulkan, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka.

Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan empat prinsip;

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme, atau perikemanusiaan
3. Mufakat, atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial

Prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ke-Tuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri.

Hendaknya Negara Indonesia, negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban ialah hormat menghormati satu sama lain”.¹⁷³

Demikianlah usulan yang disampaikan oleh Ir. Sukarno, dari isi pidato yang disampaikannya secara jelas beliau mengusulkan lima prinsip untuk menjadikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu;

1. Nasionalisme – Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan.¹⁷⁴

Kemudian Ir. Sukarno melanjutkan dan menamakan lima asasnya ini dengan sebutan Pancasila;

“Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila, Sila artinya asas, atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan

¹⁷³Daman, *Pancasila Dasar Falsafah*, h. 48-49.

¹⁷⁴*Ibid.*

lima itu, saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Jadi asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio nasionalisme, socio democratie dan Ketuhanan.

Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong royong”.

Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih Trisila, Ekasila atautkah Pancasila. Prinsip-prinsip yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia merdeka yang abadi”.¹⁷⁵

Menurut Rozikin Daman, ini jelas apa yang diusulkan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 baik itu mengenai materi lima dasar negara maupun namanya, kedudukannya ini masih berupa usulan perorangan yang diusulkan untuk dasar negara. Demikian juga dengan usulan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Prof. Mr. Soepomo dan lain-lain masih berupa usulan perorangan. Dengan demikian lanjutnya, istilah Pancasila pada waktu itu masih merupakan suatu nama bagi lima dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno kepada Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan.¹⁷⁶

Pada tahun 1947, ketika pidato itu dibukukan dan diterbitkan sebagai buku kecil yang diberi kata pengantar oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan menamainya sebagai *Lahirnya Pancasila*.¹⁷⁷

Pandangan yang sama juga dikemukakan dalam dokumen resmi *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi* yang memandang pidato Soekarno tersebut merupakan pembahasan pertama tentang Pancasila. Dengan demikian, maka tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Anggapan ini meluas sehingga Ir. Soekarno dianugerahkan *Doktor Honoris Causa* dalam ilmu hukum oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.¹⁷⁸ ketika Soekarno mencapai puncak kekuasaannya, dia dengan jelas menganggap dialah sendiri penafsir yang otoritatif Pancasila itu. “*Pengertian Pancasila seperti yang saya gariskan dalam*

¹⁷⁵Daman, *Pancasila Dasar Falsafah*, h. 49-50. Lihat juga Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 17.

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 17.

¹⁷⁸*Ibid.* Lihat juga Mohammad Roem, *Lahirnya Pancasila 1945 ‘Tiga Peristiwa bersejarah’* (Jakarta: Sinar Huda, 1972), h. 24.

buku ini”, tulisannya dalam bukunya yang berjudul ‘*Pancasila Dasar Falsafah Negara*’, “*haruslah dipakai sebagai dasar untuk mempertumbuhkan ideologi nasional progresif selanjutnya dari bangsa Indonesia*”.¹⁷⁹

Setelah penulis mengkaji tentang Pancasila, banyak orang yang beranggapan bahwa Soekarnolah yang merumus pertama sekali akan poin-poin dari Pancasila, tetapi tidak sedikit pula yang menyangkal hal tersebut, sebagaimana telah penulis paparkan sedikit diatas yang bahwa tiga hari sebelum Soekarno mengusulkan Pancasila, terlebih dahulu Muhammad Yamin telah duluan mengusulkan lima asas ini di depan sidang BPUPK sebagai dasar bagi Indonesia merdeka tapi pada saat itu belum sempat dituliskan, walaupun Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno terlihat berbeda, sebenarnya tidak berbeda, hanya kata-katanya yang berbeda, adapun maksudnya sama seperti apa yang telah diusulkan oleh Muhammad Yamin.

Mohammad Roem, salah seorang pemimpin dalam organisasi Masyumi berpendapat bahwa “tema dari kedua pidato itu sama saja, baik jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima, maupun panjang pidatonya, yaitu dua puluh halaman dalam naskah tersebut. Oleh karena itu B.J. Boland mengambil kesimpulan yang bahwa Pancasila itu ternyata karya dari Muhammad Yamin, bukan karya Ir. Soekarno.”¹⁸⁰

Menurut Endang Saifuddin Anshari yang dikemukakan dalam bukunya *Piagam Jakarta* menyebutkan bahwa “Piagam Jakarta 22 Juni 1945 merupakan sumber pertama rumusan resmi dari Pancasila, dan adapun hari lahirnya Pancasila secara resmi bukanlah pada tanggal 1 Juli 1945 atau lainnya, melainkan tanggal 22 Juni 1945, pada tanggal inilah pertama sekali Pancasila dirumuskan dan dinyatakan berlakunya untuk pertama sekali adalah tanggal 18 Agustus 1945.”¹⁸¹

B. Satu Pancasila, Beragam Tafsirannya

¹⁷⁹Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 18. Lihat juga Soekarno, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945-1946), h. 3.

¹⁸⁰Roem, *Lahirnya Pancasila 1945*, h, 25. Lihat juga Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h, 18.

¹⁸¹*Ibid.*, h, 245-246.

Rumusan dasar filsafat negara atau sebagai ideologi negara yang dikandung oleh Pembukaan UUD 1945 ialah Pancasila. Rumusan ini pulalah yang disebut rumusan dasar cita negara dan sekaligus dasar cita hukum negara Republik Indonesia. Ia dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat yang telah ada sebelum negara itu didirikan. Memang, sebelum negara ini berdiri, masyarakat telah ada sejak berabad-abad yang silam, terbentuknya sebuah masyarakat pada umumnya terjadi dengan sendirinya. Mereka berkembang dengan cita-cita, harapan, keinginan, norma bahkan bentuk ideal dalam masyarakat itu sendiri. Jadi rumusan negara terbentuk berdasarkan dari keinginan-keinginan yang direncanakan oleh manusia berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu.¹⁸²

Jika dibaca dengan seksama terhadap rumusan-rumusan dasar filsafat dalam ideologi negara sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan UUD 1945, tampaknya bahwa rumusan-rumusan itu singkat. UUD 1945 sendiri menyebutkan dirinya bersifat “soeipel” yang artinya materi yang terkandung di dalam UUD itu dari waktu ke waktu dapat ditafsirkan ulang sejalan dengan perubahan zaman dan tingkat kemajuan masyarakat.¹⁸³ Dari sinilah dapat kita pahami yang bahwa istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka yang sering di kemukakan baik dalam forum resmi atau tidak resmi.¹⁸⁴

Dalam bukunya *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, Deliar Noer mengemukakan betapa fleksibelnya penafsiran terhadap Pancasila;

“Dalam zaman Demokrasi Terpimpin, partai-partai politik juga dituntut untuk mengakui Pancasila sebagai landasan mereka bergerak; ini tercermin dalam perubahan anggaran dasar mereka masing-masing. Tetapi bagi mereka yang menginginkan dasar lain, seperti Islam, sosialisme, atau ajaran Jesus Kristus, dasar ini bisa dicantumkan juga sehingga masing-masing mereka itu mempergunakan baik Pancasila maupun dasar masing-masing. Yang aneh

¹⁸²Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 28-29.

¹⁸³*Ibid.*, h. 34.

¹⁸⁴*Ibid.*

tentu saja ketika Partai Komunis Indonesia juga mengakui Pancasila, padahal siapapun tahu bahwa paham komunisme tidak mengenal Tuhan”.¹⁸⁵

Pancasila merupakan ideologi terbuka yang maksudnya adalah yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh itu terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dari masa ke masa harus ada usaha-usaha intensif dari para cendekiawan untuk melakukan kajian-kajian secara luas dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang senantiasa muncul.¹⁸⁶

Dalam penafsiran Pancasila dan ideologi Islam ini, Natsir pernah mengemukakan yang bahwa: Pakistan merupakan sebuah negara muslim, demikian halnya dengan negara kita Indonesia ini. Walaupun kami mengakui Islam sebagai agama rakyat Indonesia, namun kami tidak menyatakan hal itu secara tegas dalam konstitusi kami, kami pun tidak pula menyisahkan agama dari kehidupan nasional kami. Indonesia telah menyatakan keyakinannya dalam Pancasila yang telah kami ambil sebagai dasar spiritual, moral dan etis bangsa dan negara kami. Inilah sedikit penggalan perkataan nasir tentang penafsirannya tentang Pancasila.

Pernah juga dilain kesempatan ketika Mohammad Natsir disuruh memberi kata sambutan dalam peringatan *Nuzulul Qur'an* pada bulan Ramadhan 1373 H, atau bertepatan dengan bulan Mei 1954, di dalam kesempatan ini Natsir menyatakan akan ketidak pertentangannya al-Qur'an dengan Pancasila. Karena perumusan Pancasila sendiri adalah hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh wakil-wakil Islam pada tahun 1945.

Adapun tentang ini sedikit penulis mengutip akan perkataan Natsir yang katanya: “Saya percaya bahwa di dalam keadaan yang demikian, para pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besar beragama Islam, pasti tidak akan

¹⁸⁵ Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), h. 12. Lihat juga Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 83.

¹⁸⁶ Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, h, 26-28.

membenarkan sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka, nyata bertentangan dengan asas dan ajaran Islam”¹⁸⁷.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan beberapa poin: *Pertama*, perumusan Pancasila bukanlah barang asing yang bertentangan atau berlawanan dengan ajaran al-Qur’an. *Kedua*, bagaimana mungkin al-Qur’an yang memancarkan ketauhidan akan bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ketiga*, al-Qur’an mengajurkan untuk adil bagi semua manusia, Pancasila juga ada Keadilan Sosial.

Walaupun demikian, harus kita akui juga meskipun ada ajaran al-Qur’an terselip di Pancasila, tetapi ini bukan berarti bahwa Pancasila itu sudah meliputi semua ajaran Islam. Pancasila memang mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi Pancasila itu bukanlah berarti Islam.

Adapun dalam usaha pengembangan-pengembangannya hendaknya harus dilihat dimana pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila itu harus dicegah keberadaannya. Pengembangannya ini harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang bersifat tetap dan tidak berubah. Adapun yang dikembangkan yaitu berupa detail-detailnya dalam menghadapi tantangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

C. Islam Didalam Sidang BPUPKI

Di dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini pula pengalaman pertama perdebatan ideologis dalam tataran praktis terjadi ketika akan menyusun dasar negara bagi bangsa Indonesia pada tahun 1945, itu cuma beberapa bulan sebelum kemerdekaan. Dalam sidang-sidang yang terjadi, para golongan Islam mengusung atau mengajukan agar Islam sebagai dasar negara berhadapan dengan golongan nasionalis yang mengharapkan agar negara dipisahkan dengan agama (netral agama) dan kelompok kebudayaan Jawa yang berasal dari Jawa Tengah, termasuk di dalamnya dua kerajaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan kelompok terakhir ini pernah mengadakan rapat tertutup di Magelang untuk membicarakan pembentukan kerajaan

¹⁸⁷Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h, 71.

(Indonesia) dengan Sultan Yogyakarta sebagai kepala negaranya. Namun pada akhirnya mereka sadar bahwa ide itu akan mengalami resistensi yang kuat dan mereka lebih memilih untuk bergabung dengan kekuatan kelompok nasionalis yang netral agama.¹⁸⁸

Namun demikian, kita juga melihatnya realitas masyarakat Indonesia lainnya yang netral terhadap agama (Islam) dan tidak menghendaki Islam memasuki wilayah-wilayah publik, meskipun sebagian besar mereka adalah juga penganut agama Islam. Secara individu, perbedaan pandangan juga terlihat antara Ahmad Hassan dan Muhammad Natsir di satu pihak dengan Soekarno dan kawan-kawannya di pihak lain. Bahkan kedua belah pihak tersebut pada tahun 1930 terlibat dalam polemik yang sangat tajam tentang hubungan Islam dan negara.¹⁸⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, akhirnya Soekarno dan Natsir yang dipandang sebagai ujung tombak dari dua pihak yang berbeda dalam pemikiran kenegaraan Indonesia. Yang satu mewakili nasionalis sekuler, sedangkan yang satunya lagi mewakili nasionalis islami. Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara sosiologis bangsa Indonesia memang memiliki dua pandangan yang berbeda dalam hubungan antara agama dan negara. Ini selalu muncul ke permukaan pada saat-saat bangsa Indonesia menyusun dasar dari negara yang akan dibangun di kemudian hari yang bisa mengayomi segenap tumpah darah rakyat Indonesia.¹⁹⁰

Dalam sejarah pemikiran politik, nasionalisme (paham kebangsaan) mengandung dua pengertian, yakni (1) penegasan kemandirian dan identitas suatu bangsa atau dalam bentuknya yang ekstrem keunggulan suatu bangsa atas bangsa lainnya dan (2) gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan melawan agresi luar. Gerakan ini baru muncul di negara-negara muslim setelah Perang Dunia I pada tahun 1917, ini terjadi karena ada beberapa faktor; (1) runtuhnya Kekhalifahan Utsmani dan munculnya negara modern yang tidak lagi didasarkan pada ideologi Islam, (2) bangkitnya perjuangan kemerdekaan melawan imperialisme Barat, (3) pengaruh ideologi gerakan Jamaluddin al-Afghani (1838-

¹⁸⁸Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 275.

¹⁸⁹*Ibid.* Lihat juga Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 78-81.

¹⁹⁰Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 275. Lihat juga Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 81.

1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M)¹⁹¹ yang mendukung paham nasionalisme untuk memperkuat persatuan melawan penjajah.¹⁹²

Dari sinilah lahir bibit-bibit pemikiran nasionalisme, mereka pun berbeda sudut pandang dalam menerima segala sesuatu yang datang dari Barat. Karena disamping menjajah, Barat juga mengembangkan gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat Muslim, hingga masyarakat Muslim terbagi kedalam tiga kelompok.¹⁹³

Kelompok *pertama*, yang disebut dengan kelompok integralis, menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya politik. Umat Islam harus bercermin dari politik yang dijalankan oleh Rasulullah dan penerusnya, tanpa perlu meniru Barat.¹⁹⁴

Kelompok *kedua*, yang disebut sekularis berpendapat bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang berbeda. Islam tidak menggariskan aturan politik yang baku dan Nabi diutus tidak benar-bener untuk mendirikan negara. Untuk kemajuan politik umat Islam harus meniru kebudayaan yang telah maju, dan itu adalah Barat. Karena itu, umat Islam tidak perlu ragu-ragu dalam mengadopsi peradaban Barat, termasuk politik kedalam segala aspek kehidupan mereka.¹⁹⁵

Kelompok *ketiga*, menolak pandangan kelompok pertama yang mengatakan Islam serba lengkap dan mengatur segala-galanya termasuk politik, mereka juga menolak kelompok yang kedua yang memisahkan antara agama dan politik. Menurut mereka Islam hanya memberikan seperangkat nilai-nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umatnya.

¹⁹¹Lebih jelas sepak terjang dari ketiga tokoh pemikiran dalam bidang sosial politik dan pembaharuan Islam bisa lihat Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 57-86.

¹⁹²Maskuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 128. Lihat lagi Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai*, h. 92.

¹⁹³Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik*, h. 129. Lihat lagi Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai*, h. 92.

¹⁹⁴Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 56.

¹⁹⁵*Ibid.*

Karena itu, umat Islam boleh mengadopsi politik Barat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam tersebut.¹⁹⁶

Lebih lanjut lagi menurut Prawoto, salah seorang tokoh Masyumi, seperti yang dikutip oleh Ahmad Syafi'i Maarif dan dikutip juga oleh Muhammad Iqbal dan kawannya Amin Husein menyebutkan, dari 65 orang anggota BPUPKI, hanya 15 orang saja yang benar-benar mendukung dan mewakili aspirasi golongan Islam. Adapun selebihnya, mereka semua menolak Islam sebagai dasar dari negara. Tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam antara lain adalah; K.H.A. Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Mansjur, K.H.A. Wachid Hasjim, Sukiman Wirjosandjojo dan Haji Agus Salim. Adapun tokoh-tokoh yang menentang Islam atau yang menginginkan pemisahan antara agama dengan negara antara lain adalah; Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat, Ahmad Subardjo, Mohammad Yamin, Soepomo dan Wongsonegoro.¹⁹⁷

Masa-masa yang dipandang sangat genting dan paling menentukan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia bagi umat Islam adalah tiga bulan menjalankan proklamasi kemerdekaan di proklamirkan. Karena semenjak inilah wakil-wakil pejuang dari berbagai latar belakang aliran ideologi politik terlibat dalam persiapan perumusan dasar negara yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan visi yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diatasi dengan adanya persetujuan bersama yang biasa disebut dengan Piagam Jakarta atau bahasan kerennya *gentlemen's agreement*.¹⁹⁸

Sejarah juga mencatat bahwa tidak diragukan lagi pembicaraan selama persidangan Badan Penyelidikan itu dengan jelas mencerminkan adanya dua posisi kelompok besar yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis kebangsaan. Isu disekitar tema ini menjadi isu yang sangat panas di kala itu dimana dalam perbincangan masyarakat menjelang kemerdekaan Indonesia.¹⁹⁹

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 275-276. Lihat juga Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 102.

¹⁹⁸ Katimin, *Politik Islam Indonesia*, h. 82.

¹⁹⁹ *Ibid.*

Permasalahan ini juga sempat memanas setelah lebih dari 10 tahun Indonesia merdeka yaitu dalam badan Konstituante bertepatan pada tahun 1956-1959²⁰⁰, bahkan sampai sekarang masalah-masalah seputar Piagam Jakarta sempat juga memanas, salah satunya seperti yang dibahas oleh Dr. Adian Husaini dalam bukunya yang berjudul *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*.²⁰¹

Supomo pernah berkata pada tanggal 31 Mei 1945, ia mengatakan “Memang disini dapat dilihat dengan jelas bahwa ada dua paham, *pertama* paham dari anggota-anggota ahli agama yang mengajukan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan yang *kedua* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tuan Mohammad Hatta yang bahwa negara persatuan nasional yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, dengan perkataan lain bukan negara Islam”.²⁰²

Lebih lanjut sebagaimana yang dikutip oleh Anshari dalam bukunya *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* disebutkan bahwa dalam *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I yang disusun oleh Muhammad Yamin dicantumkan tiga pidato terpenting yang mewakili para nasionalis sekuler, yaitu pidato Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan yang terakhir ada pidato dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.²⁰³ Sementara itu tidak ada satu pun pidato para anggota nasionalis Islam yang dimuat.²⁰⁴

D. Kompromi Dalam Sidang BPUPKI

Segera setelah sidang pertama berakhir dan sidang kedua pun belum di mulai, Badan Penyidik tepatnya tanggal 22 Juni 1945. Panitia Kecil mengadakan rapat bersama dengan anggota Badan Penyidik yang ada di Jakarta, pada waktu itu

²⁰⁰*Ibid.*

²⁰¹Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 50-59.

²⁰²Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 27. Lihat juga Yamin, *Naskah Persiapan*, h. 115.

²⁰³Lebih jelas lihat di awal bab ini mengenai latar belakang lahirnya Pancasila.

²⁰⁴Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 27.

38 orang anggota melanjutkan pertemuannya, kemudian mereka sepakat membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang yang dipilih. Adapun kesembilan orang tersebut adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo, Abikoesno Tjokrosuejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Abdu Wahid Hasyim, Haji Agus Salim dan yang terakhir ada A.A. Maramis.²⁰⁵

Para pengamat politik biasanya membagi aspirasi politik kesembilan orang tersebut sebagai berikut: empat pertama adalah nasionalis sekuler, empat kedua adalah nasionalis Islam dan yang terakhir adalah Kristen yang juga lebih condrong kepada kelompok nasional sekuler.²⁰⁶

Setelah mereka mengadakan rapat, maka tercapailah satu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk naskah “Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar” yang akhirnya rancangan ini kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta”.²⁰⁷

Rancangan Pembukaan dari hasil diskusi Panitia sembilan yang pada akhirnya disetujui sepenuhnya oleh Panitia Kecil yang kemudian diusulkan kepada Badan Penyelidik yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno yang bahwa Rancangan Pembukaan tersebut merupakan satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan.²⁰⁸

Pada tanggal 10 Juli 1945 di hadapan sidang BPUPK Soekarno membacakan Naskah yang merupakan hasil kerja keras kesembilan pendiri tokoh bangsa Indonesia. Soekarno menekankan betapa beratnya tugas panitia sembilan tersebut,²⁰⁹ sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara dua golongan anggota dan kemudian Soekarno menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai dalam panitia kecil ini yang berbunyi:

²⁰⁵Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 37. Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 28. Lihat juga Daman, *Pancasila Dasar Falsafah*, h. 52.

²⁰⁶*Ibid.*

²⁰⁷Isi dari Piagam Jakarta lebih lanjut lihat lampiran I.

²⁰⁸Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 29. Lihat juga Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 38-39.

²⁰⁹Sembilan anggota Panitia Sembilan yang menyusun Piagam Jakarta dinilai sangat berjasa bagi proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan UU No. 5 Drr Tahun 1959, Keppres No. 035/TK/Tahun 1972 dan Keppres No. 046/TK/Tahun 1992, pemerintahan RI menganugerahkan Bintang Republik Indonesia kepada sembilan tokoh tersebut. Lihat Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), h. 53.

“Allah Subhana wa Ta’ala memberikan kita.

Sebenarnya ada kesukaran mula-mula, antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhana wa Ta’ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang sudah ada persetujuan.²¹⁰

... Panitia kecil menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambuli yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Soebardjo, Maramis, Muzakir, Wahid Hasjim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosjojono, dan Haji Agus Salim itu adanya, marilah saya bacakan usulan rancangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

“Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan,²¹¹ dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²¹²

²¹⁰ Yamin, *Naskah Persiapan*, h. 154. Lihat juga Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1956), h. 33.

²¹¹ Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diterjemahkan oleh B.J. Boland kedalam bahasa Inggris dengan kata-kata “*Belief in God (Ketuhanan), with the obligation for adherents of Islam to practice Islamic law.*” (B.J. Bolnd, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), h. 25-26. Endang Saifuddin Anshari mengkritik terjemahan tersebut yang sebenarnya berbunyi *belief in God with the obligation to carry out the shari’ah Islam for its adherents*. Lihat Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 30.

²¹² *Ibid.*, h. 29. Lihat juga Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 38-39.

Itulah naskah yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta”, karena ditandatanganinya di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945. Usai menyampaikan naskah Piagam Jakarta tersebut kepada pimpinan dan anggota BPUPK, Soekarno menambahkan penjelasannya:²¹³

“Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti saya katakana tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai.²¹⁴ Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia merdeka masuk di dalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu, Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.”²¹⁵

Piagam Jakarta yang merupakan hasil kesepakatan dari karya panitia sembilan.²¹⁶ Ini mentah kembali dikarenakan ada keberatan dari pihak Kristen di bagian Timur Indonesia. Mereka mengancam akan mengundurkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan diproklamasikan, apabila tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut tetap di pertahankan.²¹⁷

Hal ini kembali memanas di sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 11 Juli 1945. Dari pihak Kristen muncul Latuharhary dari Maluku yang menggugat rumusan Piagam Jakarta. Latuharhary tidak secara tegas menyampaikan aspirasinya, tetapi dia mempersoalkan jika syariat Islam diwajibkan pada pemeluknya, maka mereka harus meninggalkan hukum adat yang sudah ditetapkannya selama ini. seperti di Minangkabau dan Maluku. Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di Maluku. Jika syariat Islam ditetapkan, maka anak

²¹³*Ibid.*

²¹⁴Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tentara Jepang pada Desember 1944. Dalam BPUPKI ini dikaji masalah-masalah dasar negara, hubungan antara kepala negara, kabinet dan parlemen.

²¹⁵Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 39.

²¹⁶Dikatakan panitia sembilan karena panitia ini terdiri dari Sembilan orang yang menandatanganinya pada tanggal 22 Juni 1945

²¹⁷Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 276.

yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan warisan. Jadi lanjutnya, kalimat semacam ini akan membawa kekacauan yang tidak kecil terhadap adat istiadat.²¹⁸

Haji Agus Salim yang asalnya dari Minangkabau membantah pernyataan dari Latuharhary, bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan kekacauan di Minangkabau. Agus Salim menegaskan “Wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang harus dipegangnya.”²¹⁹

Menanggapi pernyataan Latuharhary, Soekarno menyatakan; “barangkali tidak perlu diulang kembali bahwa *Preamble* adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima *Preamble* ini. jadi perselisihan ini akan terus berlanjut”.²²⁰

Wachid Hasjim sebagai tokoh terkemuka dari NU juga menyampaikan tanggapannya, “bahwa rumusan Piagam Jakarta itu tidak akan menimbulkan masalah seperti yang Latuharhary khawatirkan”. Malah, dengan tegas Wachid Hasjim menyatakan; “dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan kepada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyebarkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi, dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang lagi”.²²¹

Menanggapi pernyataan Wachid Hasjim, Soekarno menegaskan lagi; “saya ulangi lagi bahwa ini adalah satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis ini pun kita peroleh setelah keringat kita menetes. Jadi tuan-tuan, saya kira sudah diterima bahwa kalimat “”dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”” untuk dimasukkan kedalam *preamble* nantinya.”²²²

²¹⁸Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 40. Lihat juga Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 276.

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 41.

²²¹*Ibid.*

²²²*Ibid.*

Selain keberatan dari Latuharhary di atas, masih ada keberatan dari tokoh-tokoh nasionalis sekuler, seperti Wongsonegoro dan Husein Djajadiningrat yang memandang pencantuman tujuh kata ini menimbulkan sikap fanatisme dan kelihatannya umat Islam akan dipaksa untuk menjalankan aturan yang disyariatkan oleh agama.²²³

Dalam rapat sidang BPUPKI selanjutnya tanggal 13 Juli 1945, Suasana sidang sempat memanas ketika Wachid Hasjim mengusulkan “agar Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, begitujuga isi dari pasal 29 diubah dengan ungkapan ‘Agama Negara adalah Agama Islam’ dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain. Lanjutnya, hal ini erat hubungannya dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang mendasarkan atas kepercayaan sangatlah hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanyalah boleh diserahkan buat agama”.²²⁴

Usulan dari Wachid Hasjim ini didukung sepenuhnya oleh Soekiman, tapi Agus Salim yang juga masuk dalam golongan yang memperjuangkan Islam mengingatkan bahwa usulan ini berarti mementahkan lagi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Usulan dari Wachid Hasjim akhirnya kandas.²²⁵

Keesokan harinya pada tanggal 14 Juli Ki Bagus Hadikusumo kembali mengusulkan agar kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” yang ada dalam Piagam Jakarta dihapuskan saja. Jadi bunyinya “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”. Dan lagi-lagi Soekarno mengingatkan sudah adanya kesepakatan bersama dalam panitia kecil kita tempo hari.²²⁶

“Sudahlah, hasil kompromis diantara 2 pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan diantara kedubelabelah pihak hilang. Tiap kompromis berdasarkan kepada memberi dan mengambil, *geven* dan *nemen*. Itu suatu kompromis yang berdasarkan memberi dan mengambil. Pendek kata, inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi, panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin “Djakarta Charter”, yang disertai perkataan Tuan anggota Soekiman,

²²³Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 276.

²²⁴Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 41-42.

²²⁵*Ibid.*

²²⁶*Ibid.*

gentlemen's agreement, supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan".²²⁷

Dalam rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya yang berkenaan dengan perlunya menghormati kesepakatan yang telah dibuat oleh panitia kecil pada tanggal 22 Juni 1945. Kata Soepomo;²²⁸

“Aliran pokok pikiran yang ke-5 dalam pembukaan, ialah Negara Indonesia memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam “pembukaan” kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan ini negara memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam. Sebagai kemarin dengan panjang lebar telah diuraikan dan sesudahnya Tuan Abikoesno berpidato, telah dimufakati dengan suara bulat, maka perkataan-perkataan ini hasilnya kompromis *Gentlemen's agreement* dari dua golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itu, pasal ini harus kita pegang teguh, supaya dapat mempersatukan dua golongan itu. *Gentlemen's agreement* itu berarti memberi dan menerima atas dasar kompromis. Sebab kalau tidak begitu, kita akan melanggar dasar kemanusiaan dan dasar keutamaan yang telah kita terima dalam pembukaan. Panitia perancang undang-undang dasar, dimana termasuk anggota-anggota baik dari golongan Islam, yaitu Tuan Kiai Wachid Hasjim dan Agoes Salim, maupun dari golongan lain, misalnya tuan-tuan Latuharhary dan Maramis, menerima dengan bulat pasal 28 bab II Agama, yang berbunyi begini: 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebetulnya menurut *Gentlemen's agreement*, pembukaan sudah cukup, akan tetapi kita maju selangkah, memasukkan juga dalam undang-undang dasar perkataan tersebut”.²²⁹

Lagi-lagi perdebatan pecah disetiap sidang, kali ini perdebatan muncul ketika memasuki pembahasan sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang dasar. Perdebatan ini dipicu karena K.H. Masjkoer mengusulkan agar isi dari pasal 28 diganti saja dengan rumusan “Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama Islam”. Akhirnya Ki Bagus Hadikusumo kembali berbicara dan menegaskan kembali “ Tuan-tuan, dengan pendek kerap kali sudah dituangkan di sini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam.”²³⁰

²²⁷*Ibid.*, h. 43.

²²⁸*Ibid.*

²²⁹Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 43-44.

²³⁰*Ibid.*

Keesokan harinya tanggal 16 Juli 1945, Soekarno kembali tampil dalam sidang BPUPKI sebagai juru bicara untuk menengahi polemik yang terjadi sebelumnya. Dalam pidatonya Soekarno mengemukakan,²³¹

“Dengan terus terang saja, marilah kita sekalian sekarang menjalankan pengorbanan. Saya katakana kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya, sejak dibuang di Flores, saya belajar sembahyang tidak henti-hentinya saya memohon kepada Allah swt, supaya Allah memberi petunjuk kepada saya, supaya saya bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menunjukkan jalan kepada bangsa Indonesia, jalan bagaimana kita sekalian bisa lekas mencapai Indonesia merdeka. Marilah kita setuju usulan saya ini; terimalah *clause* di dalam Undang-undang Dasar, bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 berbunyi; “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Ayat ke-2 : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Saya minta, supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat-bulat oleh anggota sekalian, walaupun saya mengetahui, bahwa ini berarti pengorbanan yang sehebat-hebatnya, terutama sekali bagi pihak-pihak saudara-saudara patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam”.²³²

Jika kita melihat jalannya sidang-sidang BPUPKI yang kedua ini yang dimulai dari tanggal 10 - 17 Juli 1945, disini para anggota BPUPKI yang terdiri dari berbagai latar belakang ideologi politik sebenarnya telah mencapai kesepakatan terhadap rumusan Piagam Jakarta dan isis dadi UUD 1945. Seperti para tokoh Islam yang dikemukakan oleh Wachid Hasjim yang kurang puas dengan rumusan tersebut. Tetapi, seperti yang telah Soekarno sampaikan bahwa ini merupakan suatu kompromis yang sangat baik. Hanya saja, sejarah kemudian menunjukkan pada saat-saat gentingnya suasana, yaitu sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, kaum Kristen melakukan berbagai tekanan-tekanan dan ultimatum-ultimatum agar semua kesepakatan yang telah disepakati itu dibatalkan. Jika tidak, mereka lebih memilih keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya para tokoh Islam pun karena

²³¹*Ibid.*, h. 45.

²³²Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 44-45.

kecintaannya kepada kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun mahu menerima tekanan-tekanan kaum minoritas.²³³

Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang yang membahas masalah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya *Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia* menetapkan bahwa tujuh kata yang penting untuk golongan Islam itu dicoret dari naskah pembukaan.²³⁴

“Pada sore harinya saya menerima telepon dari tuan Nisyijima, pembantu Admiral Mayeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang obsi Kaigun (angkatan laut), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisyijima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir ini yang saya lupa namanya datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*” Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan *diskriminasi* terhadap mereka golongan minoritas. Jika “*diskriminasi*” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Islam.”²³⁵

Inilah sebab-musabab atau asal mula dicoretnya tujuh perkataan “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*” Kemudian tujuh perkataan tersebut dikenal sebagai “*tujuh perkataan Piagam Jakarta*”.²³⁶

E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959²³⁷

Mula-mula orang mengira bahwa pemilu yang berhasil akan menjadi obat yang mujarab bagi tercapainya keamanan, ketertiban dan kemakmuran bagi

²³³*Ibid.*, h. 46.

²³⁴Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. xiii-xiv.

²³⁵Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. xv. Lihat juga di Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tintamas, 1969), h. 66-67.

²³⁶Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 46-49.

²³⁷Mengenai teks/isi dari Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno selaku Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang selengkapnya bisa dilihat di lampiran II.

segenab rakyat Indonesia. Tapi ternyata pemilu tahun 1955 tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan rakyat Indonesia.²³⁸

Adapun penyebab yang mengakibatkan tidak tercapainya kestabilan politik, ekonomi, sosial maupun keamanan pada saat itu adalah:²³⁹

1. Makin berkuasanya modal-modal raksasa asing terhadap jalannya perekonomian nasional.
2. Tidak terdapatnya kestabilan politik disebabkan karena silih bergantinya kabinet dan faktor-faktor lainnya, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan ekonomi secara positif.
3. Pandangan dan sikap politik masyarakat dan Pemerintahan yang liberal karena landasan konstitusinya (UUDS 1950) sendiri juga demokratis parlementer (liberal) hingga menyebabkan silih bergantinya kabinet setiap waktu.²⁴⁰
4. Pemilu pada tahun 1955 sendiri ternyata tidak berhasil mencerminkan dalam DPR perimbangan kekuasaan-kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat. Misalnya masih banyaknya kekuatan-kekuatan politik ataupun kekuatan-kekuatan sosial dari daerah-daerah dan golongan yang belum diwakili dalam DPR (hal ini menunjukkan betapa pentingnya wakil-wakil golongan fungsional dalam DPR baik golongan fungsional ABRI maupun non-ABRI bagi terciptanya kestabilan politik). Kritik-kritik pedas dari daerah-daerah seperti tuduhan-tuduhan bahwa segala pembangunan ataupun keuangan hanya berpusat pada pemerintahan pusat saja, kemudian dijawab oleh pusat dengan pembentukan “Dewan Nasional” di luar DPR ditambah dengan bermacam-macam “musyawarah” nasional. Akan tetapi, demuanya tidak membawa hasil yang gemilang, selanjutnya ketidakpuasan dan ketenangan mencari jalan keluar dengan memisahkan diri dari

²³⁸Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), h. 155-156.

²³⁹*Ibid.*

²⁴⁰Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, h. 156.

pemerintahan pusat seperti pembentukannya dewan-dewan daerah (Dewan Banteng, Dewan Garuda dan sebagainya) dan pada akhirnya terjadinya pemberontakan PRRI-Permesta sehingga mereka berhasil menguasai hampir 1/6 wilayah Indonesia pada waktu itu.²⁴¹

5. Sementara itu di bidang politik kita melihat Konstituante yang tugasnya membentuk UUD yang tetap bagi negara kesatuan RI ternyata juga gagal. Walaupun badan itu telah bermusyawarah selama lebih kurang 2 setengah tahun yang membahas mengenai dasar negara saja tidak dapat mencapainya suatu kesepakatan, bahkan sebagian anggota dari BPUPKI menyatakan dirinya tidak sanggup lagi mengikuti rapat-rapat konstituante sehingga konstituante praktis tidak berkerja lagi.²⁴² Maka pada akhirnya Presiden yang juga termasuk yang harus bertanggung jawab pada waktu itu menyatakan bahwa hal-hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Dan atas dasar inilah pada akhirnya dikeluarkan dekrit presiden atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya:²⁴³
 - a) Membubarkan konstituante
 - b) Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945²⁴⁴
 - c) Tidak berlakunya lagi UUDS 1950

Maka semenjak dikeluarkannya dekrit presiden 1959, maka semenjak itulah diberlakukannya kembali UUD 1945 bagi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.²⁴⁵

Dalam kesempatan lain juga pernah disebutkan bahwa “para nasionalis Islam menyatakan kesediaannya untuk memenuhi anjuran Presiden/Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai

²⁴¹*Ibid.*

²⁴²*Ibid.*

²⁴³Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, h. 156.

²⁴⁴Mengenai teks Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilihat di lampiran III.

²⁴⁵Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, h. 155-156.

dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan pihak kebangsaan menyetujuinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Seperti yang sudah penulis bahas sebelumnya, tidak ada satu pun dari kedua kelompok besar tersebut yang berhasil menggolkan aspirasinya, karena tidak satu pun dari keduanya yang berhasil memenuhi syarat yang telah mereka tetapkan bersama, yaitu meraih persetujuan dua pertiga suara yang hadir dalam majlis. Dengan demikian, baik usulan dari golongan Islam atau golongan kebangsaan kedua-duanya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Konstituante.²⁴⁶

Majelis ini memperoleh jalan buntu pada bulan Juni 1959, disebabkan karena mayoritas para anggotanya terutama mereka yang dari Fraksi-fraksi kebangsaan menolak untuk hadir lagi dalam sidang di Bandung. Menghadapi krisis inilah maka Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden yang disetujui oleh Kabinet pada tanggal 3 Juli 1959.²⁴⁷

Dekrit ini dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959, dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada hari Minggu 5 Juli 1959 jam 17.00 di depan Istana Merdeka tepatnya di Jakarta.²⁴⁸

Menurut Muhammad Yamin, dasar pembenaran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber kepada hukum darurat kenegaraan yang dinamai *Das Notrecht des Staats* atau *Das Staats-notrecht*, yaitu suatu prinsip yang dikenal dan diakui oleh ilmu hukumnasional dan ilmu hukum internasional. Ada sebagian tokoh politik bertanya, apakah suasana darurat kenegaraan itu sesungguhnya ada dalam Republik Indonesia? “ini semata-mata adalah hasil dari pandangan atau tinjauan politik dari pimpinan negara”. Kesimpulan yang sama juga datang dari Ketua Mahkamah Agung, yang mengemukakan bahwa “pada tanggal 13 Juli 1959 Presiden mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang berbunyi; Dengan ini saya memberitahukan, bahwa sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, saya

²⁴⁶ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 109-110.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

mengharap agar supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja terus dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku lagi sejak pengumuman Dekrit di atas.²⁴⁹

BAB IV

ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Perjuangan Organisasi Islam Dalam Memperjuangkan Ideologi Bangsa

Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Islam dalam mengajukan Islam sebagai dasar negara sudah jelas sebagaimana terlihat dalam sidang BPUPKI yang akhirnya sampai kepada suatu kesepakatan bersama yaitu Piagam Jakarta dan lagi-lagi didalam sidang Majelis Konstituante. Ini dilakukan umat Islam walaupun mereka sadar akan sedikitnya dukungan dalam majelis tersebut. Walaupun demikian mereka tetap memperjuangkan aspirasinya semaksimal mungkin walau pada akhirnya mereka harus mengakui dan mendukung akan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar dari bangsa ini. Perjuangan ini dilakukan karena mengingat akan perubahan yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.

Dulu mereka menerima perubahan itu karena kecintaannya terhadap kemerdekaan dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan kesatuan bangsa yang baru berdiri, mengingat tentara Sekutu ingin mengembalikannya Belanda untuk menjajah kembali bangsa ini dan tentara Nippon yang masih lengkap senjatanya dan masih menguasai sebagian tanah air yang sudah merdeka ini.

Perjuangan Partai Masyumi dengan visi dan misi keislamannya telah membuatnya sebagai simbol Islam politik dalam Parlemen yang melahirkan perdebatan antara partai Islam dengan lawan politiknya dalam membahas masalah ideologi bangsa di dalam Parlemen. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan dinyatakan utuk

²⁴⁹*Ibid.*, h. 113.

kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian berakhirlah perdebatan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.²⁵⁰

B. Kekalahan ideologi Yang Diperjuangkan Organisasi Islam

Tanggal 22 Juni 1945 merupakan tanggal bersejarah bagi kita umat Islam di Indonesia, tanggal itu dikenal oleh umat Islam yang ada di Indonesia sebagai hari kelahiran Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*). Sejarah mencatat pada hari itu terjadi sebuah peristiwa pengesahan sebuah dokumen penting bagi umat Islam di Indonesia, yang disebut dengan “Piagam Jakarta”. Ini adalah sebuah naskah yang kemudian menjadi kontroversi panjang dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada tanggal itu, Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan sebutan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* menandatangani sebuah rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.²⁵¹

Keesokan harinya, setelah di proklamasikan kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hatta melakukan pertemuan rapat dengan beberapa tokoh Islam²⁵² yang berlangsung kurang dari 15 menit.²⁵³ Dalam rapat itu Hatta membahas masalah

²⁵⁰ Riski Priandi Harahap, *Islam Politik di Indonesia 'Analisis Historis Tentang Pergerakan Politik Masyumi (1945-1960)'*, Tesis di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014, h. 81-82.

²⁵¹ Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 50-51.

²⁵² Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera.

²⁵³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51.

keberatan golongan Kristen dan Protestan yang berada di Indonesia bagian timur akan kata-kata yang bernuansa Islam dalam Piagam Jakarta.²⁵⁴

Hasil perubahan yang diperoleh dari sidang yang teramat singkat itu disampaikan oleh Mohammad Hatta sebagai berikut:

1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.
2. Anak kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di ubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3. Dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata “dan beragama Islam”, dicoret.
4. Sejalan dengan perubahan yang kedua diatas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”²⁵⁵

Itulah empat perubahan yang teramat penting yang menyatu padukan segenap rakyat Indonesia. “Ungkapan Bung Hatta”. Kemudian Soekarno menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat ini merupakan Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat atau *Revolutiegrondwet*. Beliau melanjutkan bahwa nanti ketika suasana negara ini aman dan tentram, kita akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat dan membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.²⁵⁶

Lebih lanjut lagi, jika memperhatikan susunan dan jumlah kekuatan kelompok yang terlibat dalam soal ini. Yang mencengangkan adalah kenyataan bahwa mufakat bulat tentang pokok hal ini tercapai. Dalam hal ini kiranya kita melakukan pengamatan atas keempat tokoh muslim tersebut, yang menurut Hatta telah diundang untuk membahas masalah ini.²⁵⁷

Reaksi positif dari Teuku M. Hasan atas usulan perubahan tersebut dapat dipahami karena beliau sama sekali tidak tergolong kedalam kelompok Islam.

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 47.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*, h. 52-53.

Adapun tiga lainnya yang merupakan anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan. Menurut Prawoto, Tuan Wahid Hasjim tidak hadir dalam sidang tersebut karena sedang berada di luar daerah yaitu di Jawa Timur, sedangkan Tuan Kasman, beliau baru menerima undangan pada pagi harinya dan dapat dimengerti bahwa beliau sama sekali belum siap untuk berurusan dengan masalah ini. jadi seluruh tekanan psikologis tentang hasil penentuan diletakkan diatas pundak Ki Bagus Hadikusumo selaku pejuang Islam pada saat itu.²⁵⁸

Adapun Tuan Haji Agus Salim, Tuan Abikoesno Tjokrosoejono dan Tuan A. Kahar Muzakkir yang ketiganya merupakan penandatangan Piagam Jakarta tidak diundang untuk mengikuti sidang tersebut. Tambah lagi Tuan Wahid Hasjim pada saat itu tidak bisa hadir. Jadi dari kesembilan orang penandatangan Piagam Jakarta itu, hanya tiga orang saja yaitu Tuan Soekarno, Tuan Mohammad Hatta dan Tuan Soebardjo, yang ketiga-tiganya merupakan golongan kebangsaan. Merekalah yang terlibat dalam perubahan dalam pembukaan dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini berarti tidak seorangpun dari golongan Islam (yang empat orang tersebut) ikut terlibat dalam proses tersebut.²⁵⁹

Prawoto²⁶⁰ menyebutkan dalam bukunya “*Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*”, sebagaimana yang dikutip oleh Anshari menyebutkan bahwa; Apa sebabnya Piagam Jakarta yang diperoleh dengan cucuran keringat, memeras otak dan tenaga yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka bangsa kita dan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam beberapa menit saja kesepakatan itu dapat dirubah? kenapa dan apa sebabnya? Kekuatan seperti apa yang mendorong dari belakang sehingga perubahan itu terjadi? Prawoto tidak tahu apakah pertanyaan ini masih dapat dijawab dengan jujur dan tepat? Dan apa sebab juga

²⁵⁸*Ibid.*

²⁵⁹Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 53.

²⁶⁰Seoran pemimpin utama dari partai Masyumi, yang merupakan Partai Islam terbesar di Indonesia pada saat itu dan yang menjadi Ketua Umum partai tersebut sampai pada akhirnya partai itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Lebih jelas masalah Peran dari Partai masyumi lihat Tesis Rizki Pristiandi Harahap, *Islam Politik di Indonesia 'Analisis Historis Terhadap Perjuangan Politik Masyumi 1945-1960'*, Tesis Program Pascasarjana 2014.

Soekarno yang dulu mati-matian mempertahankan Piagam Jakarta, kemudian justru mempelopori usaha untuk mengubahnya?²⁶¹

Lebih dari sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1957, K.H.M. Isa Anshari berkata dalam sidang Majelis Konstituante, beliau menyebutkan bahwa: “Kejadian yang mencolok mata itu, dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu “permainan sulap” yang masih diliputi oleh kabut rahasia sebagai permainan politik pat-pat gulipat terhadap golongannya; akan tetapi mereka diam tidak mengadakan tantangan dan perlawanan, karena jiwa toleransi mereka”.²⁶²

C. Penyebab Kekalahan Ideologi Organisasi Islam

Berikut ini penulis mengutip paparan yang kemukakan oleh Prof. Kasman Singodimedjo, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Adian Husaini, Prof Kasman ini adalah salah seorang anggota BPUPKI yang mengikuti sidang yang terakhir yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945:

“Waktu tiba di Pejambon sedang ramai-ramainya diadakan lobbying di antara anggota-anggota panitia. Dan tidaklah sulit bagi saya untuk mengetahui materi apakah yang sedang menjadi persoalan serius itu. Adapun materi termaksud adalah usul dari pihak non-Muslim di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menghapuskan 7 (tujuh) kata-kata dari Piagam Jakarta, yakni berbunyi: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Dilihat dari segi pengusul-pengusulnya adalah logis sekali, bahwa mereka itu mengambil kesempatan dari psychologis moment yang pada waktu itu “ready for use” untuk memajukan usulannya yang peka (*gevoelig*), justru pada suatu moment bahwa “kemerdekaan Indonesia” sebagai kenyataan pada hari kemarnya (17 Agustus 1945) telah diproklamlirkan, artinya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi dan kemungkinannya hanya satu, yaitu untuk maju terus dan menghadapi segala konsekwensi follow up dari proklamasi telah merdeka itu.

Dan justru konsekwensi itulah memerlukan atau membutuhkan kekompakan dan persatu paduan dari keseluruhan bangsa Indonesia tanpa kecuali, apalagi untuk menghadapi Tentara Sekutu yang dengan kelengkapan senjatanya telah tercium sudah “tingil-tingil” hendak mendarat di daratan Indonesia, sedang bala tentara Dai Nippon menurut kenyataannya masih saja “tongol-tongol” berada di daratan Indonesia, pula lengkap dengan

²⁶¹ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, h. 48-49. Lihat juga Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi* (Jakarta: Hudaya, 1970), h. 21.

²⁶² *Ibid.*

persenjataannya yang belum lagi sempat untuk diserahkan sebagai akibat kalah perang kepada Sekutu yang menang perang.

Memang pintar minoritas non-Muslim itu. Pintar untuk memanfaatkan kesempatan moment psychologist. Dalam pada itu pembicaraan di dalam lobbying mengenai usul materi tersebut agak tegang dan sengit juga. Tegang dan sengit karena Piagam Jakarta itu pada tanggal 22 Juni 1945 toch dengan seksama dan bijaksana telah di tetapkan dan di putuskan bersama. Apalagi dari rumusan tujuh kata-kata itu yang dapat dianggap sebagai merugikan golongan non-Muslim? Golongan ini sama sekali tidak akan berkewajiban atau diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam; tidak! Bahkan toleransi Islam menjamin golongan non-Muslim itu mengamalkan ibadahnya sesuai dengan keinginannya.

Bahkan golongan non-Muslim mempunyai kepentingan yang besar sekali, bahwa umat Islam itu akan mentaati dan menjalankan agamanya (Islam) setertib-tertibnya, sebab jika tidak begitu, maka golongan minoritas non Islam itulah pasti akan menjadi korban dari pada mayoritas brandal-brandal, bandit-bandit dan bajingan selama yang tidak tertib Islam itu.

Sayapun di dalam lobbying itu ingin sekali mempertahankan Piagam Jakarta sebagai unit yang utuh, tanpa pencoretan atau penghapusan dari kata-kata termaksud, karena Piagam Jakarta itu adalah wajar dan logis sekali bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Tetapi sayapun tidak dapat memungkiri apalagi menghilangkan, adanya situasi darurat dan terjepit sekali itu. Kita bangsa Indonesia pada waktu itu sungguh terjepit antara Sekutu yang telah tingil-tingil hendak mendarat dan menjajah kembali di bawah penjajah Belanda (anggota Sekutu) dan pihak Jepang yang tongol-tongol masih berada di bumi kita, yakni Jepang yang berkewajiban menyerahkan segala sesuatunya (termasuk Indonesia) kepada Sekutu (termasuk Belanda)!

Jepitan itulah yang membikin kami golongan Islam dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tidak dapat ngotot prinsipil, dan akhirnya kami menerima baik janji Bung Karno, yakni bahwa nanti 6 (enam) bulan lagi wakil-wakil bangsa Indonesia berkumpul di dalam forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan Undang-undang Dasar yang sempurna sesempurna-sempurnanya, seperti (janji tersebut) dapat juga dibaca di dalam Undang-undang Dasar 1945 bagian terakhir".²⁶³

Inilah sedikit cerita dari salah seorang dari anggota BPUPKI seputar jepitan yang dialami oleh tokoh-tokoh Islam ketika itu, ketika mereka harus mengorbankan aspirasi mereka dan keselamatan negara yang mereka cintai dan idam-idamkan.²⁶⁴

²⁶³Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 46-49.

²⁶⁴*Ibid.*

Para tokoh-tokoh Islam itu sangat mencintai bangsa ini dan pada saat yang sama, mereka meyakini benar kebenaran agama yang mereka anut sehingga mereka senantiasa berusaha memperjuangkannya kembali ketika kesempatan itu telah terbuka kembali. Bisa kita bayangkan, apa yang akan terjadi andaikata para tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam ketika itu bertahan dengan sikapnya untuk mempertahankan Piagam Jakarta secara utuh.²⁶⁵

Lebih lanjut lagi senada dengan Prof. Kasman Singodimedjo, K.H. Saifuddin Zuhri juga pernah menulis tentang masalah ini, beliau mengatakan bahwa; “Dihapuskannya 7 kata-kata yang ada di dalam Piagam Jakarta itu bisa dikatakan tidak diributkan oleh tokoh Islam maupun umat Islam, karena demi menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan demi ketahanan perjuangan dalam revolusi Bangsa Indonesia, tokoh Islam sangat mencintai Indonesia merdeka dan tidak dijajah lagi oleh bangsa lain, karena itulah menjaga kekompakan seluruh potensi nasional dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang baru berusia 24 jam.”²⁶⁶

Coba kita fikir, apakah ini bukan suatu toleransi terbesar dari Umat Islam Indonesia? Bisa dibayangkan jika pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu ketika UUD 1945 disahkan dan umat Islam Ngotot dalam mempertahankan 7 kata-kata dalam Piagam Jakarta tersebut seperti yang terjadi di dalam sidang-sidang BPUPKI, barangkali sejarah ini akan menjadi lain. Tetapi semuanya ini sudah terjadi dan umat Islam hanya mengharapkan prospek-prospek di masa yang akan datang, semoga semuanya menjadi hikmah buat kita semua. Amiiin.²⁶⁷

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Salah satu bentuk prestasi golongan Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara adalah dengan lahirnya Piagam Jakarta yang tertera di

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas*, h. 46-49.

²⁶⁷ *Ibid.* Lihat juga Saifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik di Indonesia*, jilid 3 (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 51-52.

dalamnya “*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Namun sehari setelah Indonesia Merdeka kata-kata itu di hapuskan karena banyak alasan. Kebijakan ini dilakukan demi menjaga kesatuan dan keutuhan Indonesia yang baru merdeka ini. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta memicu golongan Islam membentuk organisasi, sehingga pada tanggal 7 November 1945 terbentuklah satu organisasi yaitu Mayumi yang akhirnya menjadi partai Islam terbesar di Indonesia pada saat itu. Pada saat itulah organisasi Islam memperjuangkan terbentuknya suatu negara yang berasaskan Islam di dalamnya.

Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Islam dalam mengajukan Islam sebagai dasar negara sudah jelas sebagaimana terlihat dalam Majelis Konstituante. Ini dilakukan umat Islam walaupun mereka sadar akan sedikitnya dukungan dalam majelis tersebut. Walaupun demikian mereka tetap memperjuangkan aspirasinya semaksimal mungkin walau pada akhirnya mereka harus mengakui dan mendukung akan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar dari bangsa ini. Perjuangan ini dilakukan karena mengingat akan perubahan yang dilakukan terhadap Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Dulu mereka menerima perubahan itu karena kecintaannya terhadap kemerdekaan dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan kesatuan bangsa yang baru berdiri, mengingat tentara Sekutu ingin mengembalikannya Belanda untuk menjajah kembali bangsa ini dan tentara Nippon yang masih lengkap senjatanya dan masih menguasai sebagian tanah air yang sudah merdeka ini.

E. Saran-saran

Penulis menyadari yang bahwa hasil penelitian yang penulis kerjakan ini masih belum cukup mampu untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia secara komprehensif, ini semua bukan karena keterbatasan akses terhadap referensi-referensi dan sumber data yang dibutuhkan,

ini semua karena keterbatasan nalar penulis dalam melakukan penelitian ini. Untuk itu penulis mengira perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh tentang sejarah dasar negara kita tercinta ini (Indonesia).

Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan tesis penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif dari pihak manapun demi perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan tesis penulis ini.

F. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta berbagai kenikmatan, terutama kenikmatan Iman dan kenikmatan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu berupa tesis ini.

Penulis telah mencoba untuk mencurahkan semaksimal mungkin usaha dalam menyusun kata demi kata, bait demi bait dalam penyelesaian tesis ini. Namun penulis menyadari yang bahwa penulisan, pembahasan, dan isi muatan dalam tesis ini masih saja jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima segala jenis kritikan yang konstruktif dan saran selanjutnya demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga sedikit penelitian ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian. Amien Ya Rabbal Alamiin.